



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

# LAPORAN KINERJA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA TENGAH  
TAHUN 2020  
(SETELAH REVIU)



PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA



KEMENTERIAN  
HUKUM



PASTI Nyata



## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3
Ringkasan Eksekutif	4
<b>BAB I            Pendahuluan</b>	<b>9</b>
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi .....	11
B. Aspek Strategis Organisasi .....	12
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi .....	16
D. Struktur Organisasi Kantor Wilayah.....	17
E. Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah.....	20
<b>BAB II            Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>21</b>
A. Rencana Strategis .....	22
1. Pernyataan Visi .....	23
2. Pernyataan Misi .....	24
3. Tata Nilai & Tujuan.....	25
4. Pernyataan Tujuan.. .....	26
5. Program dan Kegiatan .....	27
6. Indikator Kinerja Utama/Outcome/Output.....	28
B. Perjanjian Kinerja .....	30
<b>BAB III            Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>33</b>
A. Capaian Kinerja Kantor Wilayah .....	34
B. Dampak Pandemi Covid-19.....	38
C. Analisis Capaian Kinerja.....	40
D. Realisasi Anggaran .....	61
<b>BAB IV            Penutup .....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan .....	65
B. Saran .....	66
Lampiran-lampiran	67
Perjanjian Kinerja	68
Realisasi Anggaran Seluruh Program Eselon I	121

**KATA PENGANTAR**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2020 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2020. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2020 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang didokumentasikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam menganalisa pencapaian program atas kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Capaian kinerja Tahun 2020 yang tertuang dalam Laporan Kinerja merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2020. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 2020 – 2024. Laporan Kinerja Tahun 2020 menggambarkan Capaian Kinerja Tahun 2020. Kami berharap Laporan Kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2020 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah selama Tahun 2020 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja pada Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun 2020 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 2015 memberikan anggaran kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terbagi dalam 9 (sembilan) Petikan DIPA dari unit Eselon I.

Perbandingan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2020 dengan alokasi tahun 2019 sebagai berikut:

No.	PROGRAM (ESELON I)	2020	2019
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Sekretariat Jenderal)	Rp. 23,737,631,000	Rp. 18,329,758,000
2.	Administrasi Hukum Umum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	Rp. 3,139,000,000	Rp. 3,500,000,000
3.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan (Direktorat Jenderal Pemasarakatan)	Rp. 1,086,765,000	Rp. 1,156,960,000
4.	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian (Direktorat Jenderal Keimigrasian)	Rp. 1,241,298,000	Rp. 1,203,000,000
5.	Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	Rp. 820,189,000	Rp. 270,072,000
6.	Pembentukan Hukum (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	Rp. 175,265,000	Rp. 210,680,000
7.	Pemajuan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)	Rp. 308,738,000	Rp. 308,738,000
8.	Pembinaan Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	Rp. 5,982,046,000	Rp. 6,311,966,000
9.	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum & HAM (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)	Rp. 56,989,000	Rp. 39,080,000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 36,754,891,000</b>	<b>Rp. 31,330,254,000</b>

Dari perbandingan Alokasi anggaran pada tahun 2019 dan tahun 2020, terdapat beberapa Program yang mengalami kenaikan dan ada pula Program yang mengalami penurunan. Terdapat 4 (empat) alokasi anggaran yang mengalami kenaikan yaitu pada Program (Eselon I): a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya (Sekretariat Jenderal); b. Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian (Direktorat Jenderal Keimigrasian); c. Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual); d. Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum & HAM (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM).

Sedangkan alokasi anggaran yang mengalami penurunan ada 4 (empat) yaitu pada Program (Eselon I): a. Administrasi Hukum Umum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum); b. Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan (Direktorat Jenderal Pemasarakatan); c. Pembentukan Hukum (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan); d. Pembinaan Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional).

Sementara alokasi anggaran pada Program Pemajuan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tidak mengalami perubahan dengan tahun sebelumnya.



Total realisasi anggaran 9 Petikan DIPA dari unit Eselon 1 untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah 97.97% dari total pagu anggaran Tahun 2020 sebesar Rp.36.754.891.000,-. Realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Program (Eselon I)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sisa Total (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Sekretariat Jenderal)	23,737,631,000	23,573,825,683	99.31	163,805,317
2	Administrasi Hukum Umum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	3,139,000,000	3,087,931,430	98.37	51,068,570
3	Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat (Direktorat Jenderal Masyarakat)	1,086,765,000	1,077,746,787	99.17	9,018,213
4	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian (Direktorat Jenderal Keimigrasian)	1,241,298,000	776,303,901	62.54	464,994,099
5	Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	820,189,000	772,119,689	94.14	48,069,311
6	Pembentukan Hukum (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	175,265,000	174,053,183	99.31	1,211,817
7	Pemajuan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)	308,738,000	308,036,216	99.77	701,784
8	Pembinaan Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	5,982,046,000	6,183,217,624	99.91	5,798,376
9	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum & HAM (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)	56,989,000	56,914,425	99.87	74,575
<b>Jumlah</b>		<b>36,754,891,000</b>	<b>36,010,148,938</b>	<b>97.97</b>	<b>744,742,062</b>

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah selalu berusaha mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai sasaran program dan kegiatannya. Capaian tersebut ditunjukkan melalui capaian masing-masing indikatornya. Ukuran Indikator-indikator yang tercapai pada tahun 2020 antara lain:

1. Meningkatnya indeks layanan kepuasan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Masyarakat di Jateng
3. Meningkatnya Persentase mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah Jawa Tengah
4. Menurunnya persentase residivis di wilayah Jawa Tengah
5. Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah Jawa Tengah
6. Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di Bidang Hukum dan HAM

7. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Jateng
8. Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah
9. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah
10. Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi
11. Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi
12. Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin
13. Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi
14. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
15. Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah
16. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
17. Jumlah Kab/Kota Peduli HAM
18. Jumlah instansi pemerintah yang menindak lanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM
19. Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah
20. Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan di wilayah yang mendapatkan pembinaan
21. Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah
22. Jumlah penyuluhan hukum di daerah
23. Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah
24. Persentase layanan program AHU di Kanwil Jawa Tengah yang diselesaikan
25. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
26. Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah
27. Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN

Sedangkan indikator yang belum tercapai sampai dengan tahun 2020 antara lain:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
  2. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
- Dari indikator-indikator tersebut, ada indikator kinerja (kegiatan) yang tercapai optimal dan ada juga yang belum tercapai secara maksimal, belum tercapainya indikator tersebut secara maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain:

- 1) Belum keluarnya nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah;
- 2) LKIP kantor wilayah belum mendapatkan penilaian;
- 3) Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan tindak lanjut yang konkrit dan segera khususnya terkait dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
- 4) Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan;
- 5) Masih diperlukan pemetaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana;
- 6) Belum optimalnya kegiatan yang dilaksanakan atau bahkan tertunda dikarenakan terdampak pandemi Covid-19, dimana di wilayah Jawa Tengah khususnya kota Semarang termasuk dalam zona merah penyebaran wabah Covid-19 sampai dengan Desember 2020.

Atas kekurangan capaian kinerja dimaksud pada tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah akan melakukan peningkatan pada Tahun 2021, antara lain dengan:

1. Melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya (sesuai dengan yang telah direncanakan) dengan tetap berpegang pada akuntabilitas pelaksanaan anggaran serta dengan tetap mentaati Protokol Kesehatan;
2. Pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan penataan organisasi dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mewujudkan Visi Kementerian Hukum melalui pelayanan prima kepada masyarakat;
3. Mengalihkan kegiatan yang mengharuskan tatap muka menjadi secara virtual.

Kepala Kantor Wilayah

A. Yuspahrudin  
NIP. 196305281985031002





# BAB I PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan:

1. dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah;
3. mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan
4. memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*Performance accountability Report*) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan juga Rencana Strategis tahun 2020-2024. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di masa yang akan datang.

Berdasarkan 10 sasaran tersebut dan Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan dan Perjanjian Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-013.01.2.408742/2020 Tanggal 12 November 2019;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA- 013.03.2.408743/2020 Tanggal 12 November 2019;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham RI (Ditjen PAS) Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA- 013.05.2.408744/2020 Tanggal 12 November 2019;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI (Ditjen Imigrasi) Nomor: DIPA- 013.06.2.408745/2020 Tanggal 12 November 2019;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Tahun

Anggaran 2020 Nomor: DIPA- 013.07.2.408746/2020 Tanggal 12 November 2019;

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA- 013.10.2.408749/2020 Tanggal 12 November 2019;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (BALITBANG HAM) Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA- 013.11.2.408750/2020 Tanggal 12 November 2019;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA- 013.09.2.408748/2020 Tanggal 12 November 2019; dan
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (PP) Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA- 013.08.2.408747/2020 Tanggal 12 November 2019.

#### **A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi (Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum dan HAM). Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah propinsi dengan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

## B. Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

### 1. Potensi Internal

#### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah terdiri dari:

Jabatan	Jumlah	%
Eselon IIa	1	1%
Eselon IIb	4	2%
Eselon III	9	5%
Eselon IV	17	9%
JFT	53	28%
JFU	117	55%
Jumlah	200	100%

Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, pemasyarakatan, keimigrasian, akuntansi, manajemen, teknologi informasi, perancangan peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar/*workshop* dan Program Pelatihan Mandiri (PPM) sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi. Permasalahan dalam pengelolaan SDM adalah jumlah SDM yang ada saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi serta komposisi SDM berdasarkan kompetensi (sertifikasi).

#### b. Sarana dan Prasarana

Sarana (Peralatan Kantor) dan Prasarana Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Dr. Cipto No. 64 Semarang yang menempati areal tanah seluas 3.306 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 2.000 m<sup>2</sup>, merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sampai dengan tahun 2020 memiliki 71 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari:

- 26 (Dua Puluh Enam) UPT Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- 20 (Dua Puluh) UPT Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

- 8 (Delapan) UPT Balai Pemasarakatan (BAPAS);
- 8 (Delapan) UPT Rumah Penyimpanan Basan dan Baran (RUPBASAN);
- 6 (Enam) UPT Kantor Imigrasi;
- 1 (Satu) UPT Rumah Deteni Imigrasi (RUDENIM);
- 1 (Satu) UPT Balai Harta Peninggalan (BHP). dan
- 1 (Satu) UPT Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah meliputi 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan jumlah SDM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah hingga tahun 2020 sejumlah 4.022 pegawai.

**c. Komitmen Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM di Pusat dan Kantor Wilayah**

Komitmen Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Terkait dengan restrukturisasi Program dan Kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pimpinan telah menjaga proses restrukturisasi, melakukan komunikasi dan menyemangati proses restrukturisasi tersebut.

**d. Komitmen Pemerintah Pusat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih**

Tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik dan kepastian atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Arah yang diinginkan adalah bahwa semua kinerja pemerintahan diharapkan dapat memuaskan harapan publik melalui karya nyata dan berkelanjutan. Komitmen awal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## 2. Potensi Eksternal

### a. Forum DILKUMJAKPOL PLUS

Kerjasama dengan instansi terkait di dalam Forum Dilkumjakpol Plus antara Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dengan instansi terkait telah terbangun dengan baik. Melalui forum tersebut dapat di bangun proses koordinasi, kesatuan persepsi dan sinergitas dalam rangka penegakan hukum di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

### b. Nusakambangan sebagai Pulau Khusus Penjara

Pulau Nusakambangan yang berada di wilayah Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Cilacap dengan luas kurang lebih 121 km<sup>2</sup> telah didirikan 8 Lembaga Pemasyarakatan yaitu Lapas Batu, Lapas Besi, Lapas Kembangkuning, Lapas Permisian, Lapas Pasir Putih, Lapas Narkotika, Lapas Terbuka Nusakambangan, serta Lapas Khusus Karanganyar yang telah diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 22 Agustus 2019 merupakan lapas *high risk profile* yang dikhususkan untuk menampung narapidana yang beresiko tinggi seperti Teroris, dan khususnya bandar Narkoba dengan menerapkan standar pengamanan super maximum serta didukung dengan penggunaan alat dan teknologi yang high tech, dimana Lapas Karanganyar juga akan menjadi icon untuk Lapas *Super Maximum Security* yang ada di Indonesia. Pulau Nusakambangan bisa di jadikan sebagai refleksi penyelenggaraan revitalisasi Pemasyarakatan. Eksplorasi Pulau Nusakambangan dengan baik dapat mendukung tercapainya renstra Program Pemasyarakatan

### c. *Corporate Social Responsibility (CSR)*, GRBB dan HIBAH

Keterbatasan anggaran yang ada di Satuan Kerja Pemasyarakatan dalam mendukung pengadaan Sarana dan Prasarana untuk mencapai rencana kerja, dapat di upayakan dengan melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui program CSR, Ganti Rugi Bentuk Barang (GRBB) serta Hibah.

### d. Kewenangan melakukan Pembinaan dan Pengawasan Notaris

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Jabatan Notaris, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan kewenangan melakukan Pembinaan dan Pengawasan Notaris melalui lembaga Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang beranggotakan 9 (Sembilan) orang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu 3 (tiga) orang unsur Pemerintah, 3 (tiga) orang unsur Akademisi dan 3 (tiga) orang unsur Notaris, dengan komposisi unsur Pemerintah: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Jawa Tengah dan Kepala Biro Hukum Propinsi Jawa Tengah.



**e. Keterlibatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Proses Legislasi daerah**

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa: UU No. 12/2011, bahwa dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Dan Angka Kreditnya (Keputusan Menteri PAN No. 41/KEP/M.PAN/12/2000) yang dimaksud dengan Perancang Peraturan Perundang-Undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah. Dengan ditetapkannya keterlibatan perancang pada setiap tahap penyusunan peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa peran Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legislative drafter*) menjadi sangat strategis. Kebutuhan akan Perancang Peraturan Perundang-undangan semakin penting untuk menghindari permasalahan umum yang biasa terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan;

**f. Keterlibatan jajaran keimigrasian terkait penegakan hukum terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia (khususnya di Jawa Tengah) serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.**

Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) Jawa Tengah yang terdiri dari Badan atau Instansi Pemerintah di wilayah Jawa Tengah yang terkait dalam pengawasan orang asing melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan ke luar, keberadaan serta kegiatannya di Propinsi Jawa Tengah;

**g. Keterlibatan sebagai penanggung jawab pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah (Jawa Tengah)**

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (*orang miskin*), pemberi bantuan hukum (*organisasi bantuan hukum*) serta penyelenggara bantuan hukum (*Kementerian Hukum dan HAM RI*). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditanggihkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan *tanggung jawab negara* dalam

mewujudkan *equality before the law* (asas persamaan hak), *aces to justice* (kebutuhan akses kepada keadilan), dan *fair trial* (kepastian hukum yang adil). Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yg diberikan Oleh pemberi bantuan hukum (Organisasi Bantuan Hukum) secara cuma-cuma kepada penerima bankum. Bantuan Hukum yang diberikan meliputi masalah hukum Pidana, Perdata dan Tata-Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi;

**h. Keterlibatan Tenaga Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, yakni Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum dan kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**i. Keterlibatan Dalam Tim Evaluasi Terpadu Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.AH.10.01-23 tanggal 30 Maret 2011 perihal permohonan Pewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 8 dan 19 UU No. 12 tahun 2006, Kantor Wilayah membentuk Tim Evaluasi Terpadu Penerimaan Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang beranggotakan dari instansi terkait dengan dokumen yang dikeluarkan untuk orang asing yaitu: Divisi Keimigrasian, Dinas Kesehatan Propinsi, Kepolisian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kejaksaan Tinggi, untuk melakukan verifikasi dokumen pengajuan permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

**C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi**

Sejalan dengan upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatnya pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pelayanan publik sebagai berikut:

1. Pelayanan Pemasarakatan (Warga Binaan Pemasarakatan)
2. Pelayanan Informasi Keimigrasian
3. Pelayanan Jasa Hukum

- a. Di bidang Kenotariatan (pengambilan sumpah notaris)
  - b. Di bidang Fidusia (permohonan sertifikat jaminan fidusia-*online*)
  - c. Di bidang kewarganegaraan (Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia)
4. Pelayanan Kekayaan Intelektual
- Permohonan di bidang Kekayaan Intelektual:
- a. Pendaftaran Merek
  - b. Permohonan Hak Cipta
  - c. Pendaftaran Paten
  - d. Pendaftaran Desain Industri
5. Pelayanan Komunikasi Masyarakat
- Melakukan Mediasi atas pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dan pemenuhan Hak Asasi Manusia
6. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
- Menyediakan anggaran Bantuan Hukum cuma-cuma melalui Organisasi Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang sedang berperkara di Pengadilan.

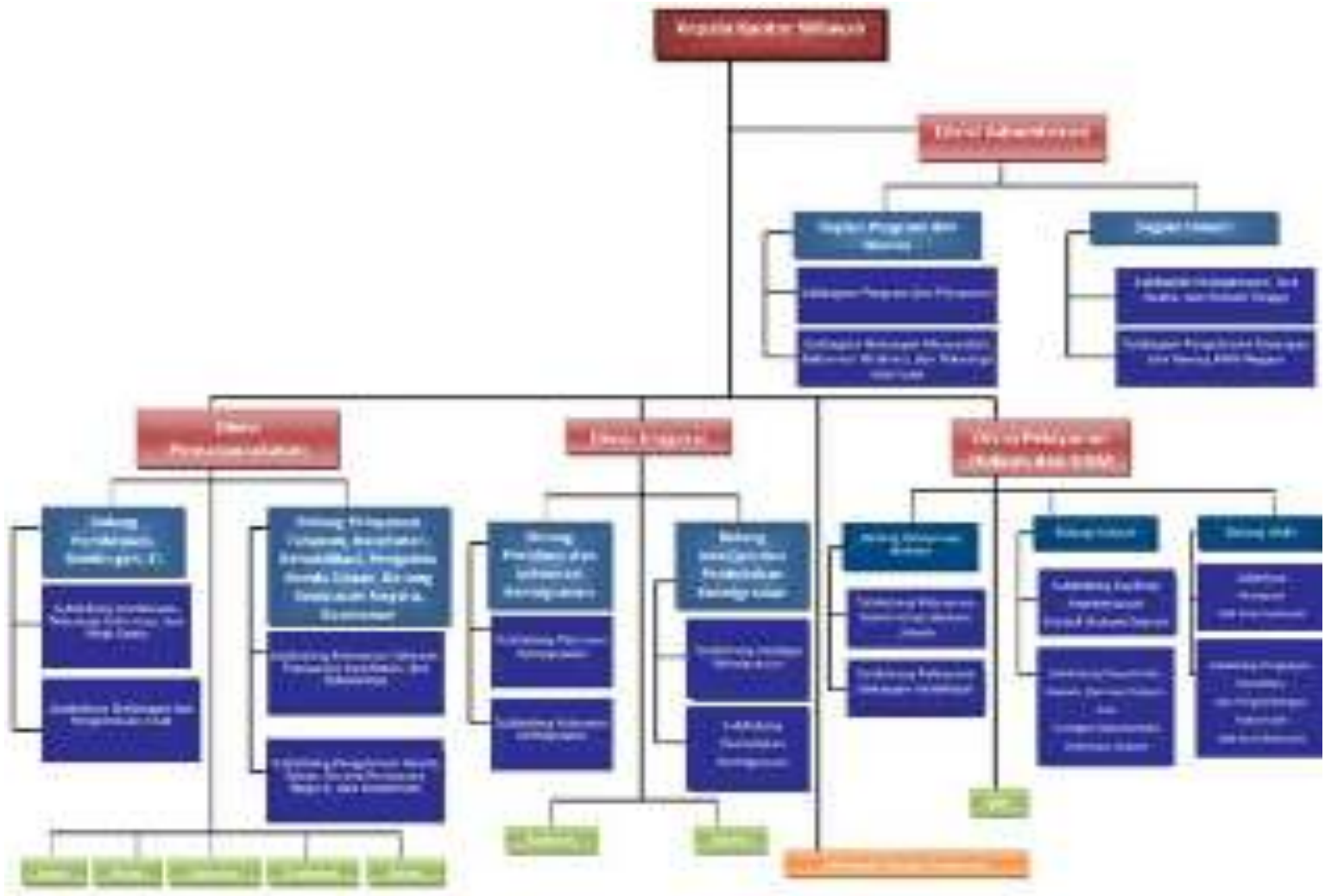
#### D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah;
2. 4 (empat) orang Kepala Divisi:
  - Kepala Divisi Administrasi,
  - Kepala Divisi Pemasarakatan,
  - Kepala Divisi Keimigrasian dan
  - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. 2 (dua) orang Kepala Bagian:
  - Bagian Umum dan
  - Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
4. 7 (tujuh) orang Kepala Bidang:
  - a. Bidang Pemasarakatan,
    - Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi; dan
    - Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

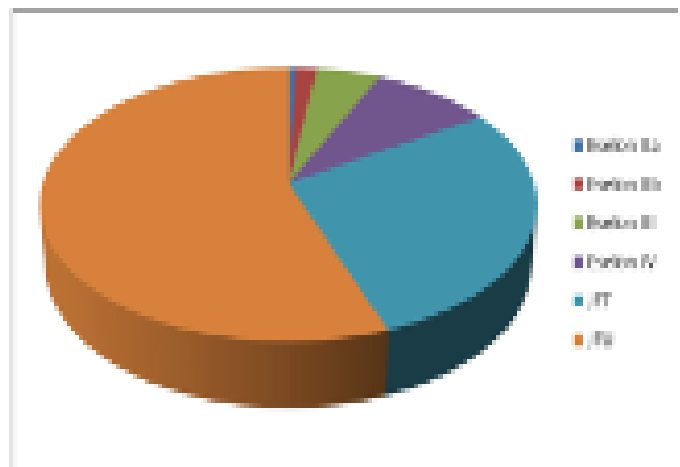
- b. Bidang Keimigrasian
    - Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; dan
    - Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian.
  - c. Bidang Pelayanan Hukum dan HAM
    - Bidang Pelayanan Hukum;
    - Bidang Hak Asasi Manusia; dan
    - Bidang Hukum.
5. 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian
- Sub Bagian Program dan Pelaporan
  - Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
  - Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
  - Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
6. 14 (empat belas) orang Kepala Sub Bidang
- Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
  - Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
  - Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
  - Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
  - Sub Bidang Perizinan Keimigrasian
  - Sub Bidang Informasi Keimigrasian
  - Sub Bidang Intelijen Keimigrasian
  - Sub Bidang Penindakan Keimigrasian
  - Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
  - Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
  - Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Hukum Daerah
  - Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
  - Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
  - Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Struktur Ogranisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah



Berikut adalah grafik dari jumlah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pada tahun 2020 berdasarkan jabatan:

Jabatan	Jumlah	%
Eselon IIa	1	1%
Eselon IIb	4	2%
Eselon III	9	5%
Eselon IV	17	9%
JFT	53	28%
JFU	117	55%
Jumlah	200	100%



**E. Satuan Kerja / Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah**

Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah "*Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya*". Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terdiri dari 4 (empat) Divisi yaitu:

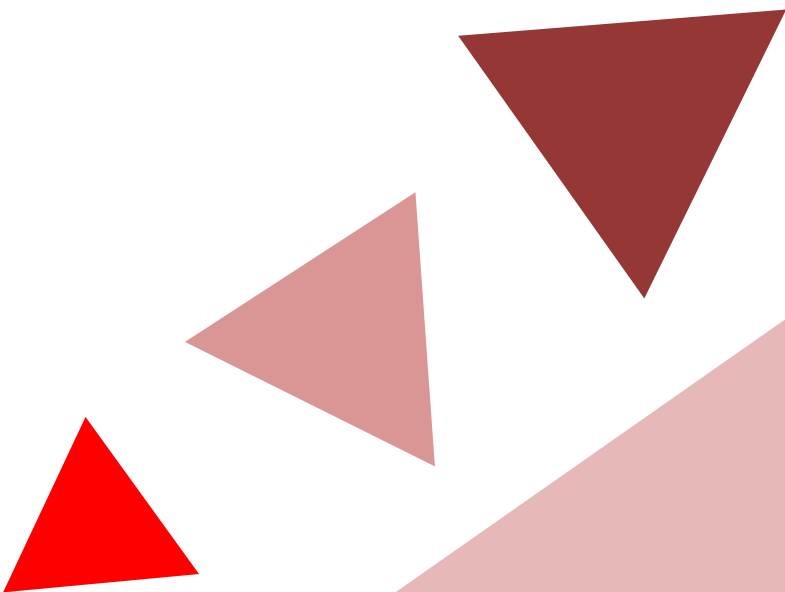
- a. Divisi Administrasi, melaksanakan 1 (satu) Petikan DIPA:
  - Sekretariat Jenderal
- b. Divisi Pemasarakatan, melaksanakan DIPA Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
- c. Divisi Keimigrasian, melaksanakan DIPA Direktorat Jenderal Imigrasi;
- d. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, melaksanakan 6 (enam) DIPA:
  - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
  - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
  - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
  - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
  - Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
  - Badan Pembinaan Hukum Nasional
- e. 71 Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari:
  - 26 (Dua Puluh Enam) UPT Lembaga Pemasarakatan (LAPAS);
  - 20 (Dua Puluh) UPT Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
  - 8 (Delapan) UPT Balai Pemasarakatan (BAPAS);
  - 8 (Delapan) UPT Rumah Penyimpanan Basan dan Baran (RUPBASAN);
  - 6 (Enam) UPT Kantor Imigrasi;
  - 1 (Satu) UPT Rumah Deteni Imigrasi (RUDENIM); dan
  - 1 (Satu) UPT Balai Harta Peninggalan (BHP).
  - 1 (Satu) UPT Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.





## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

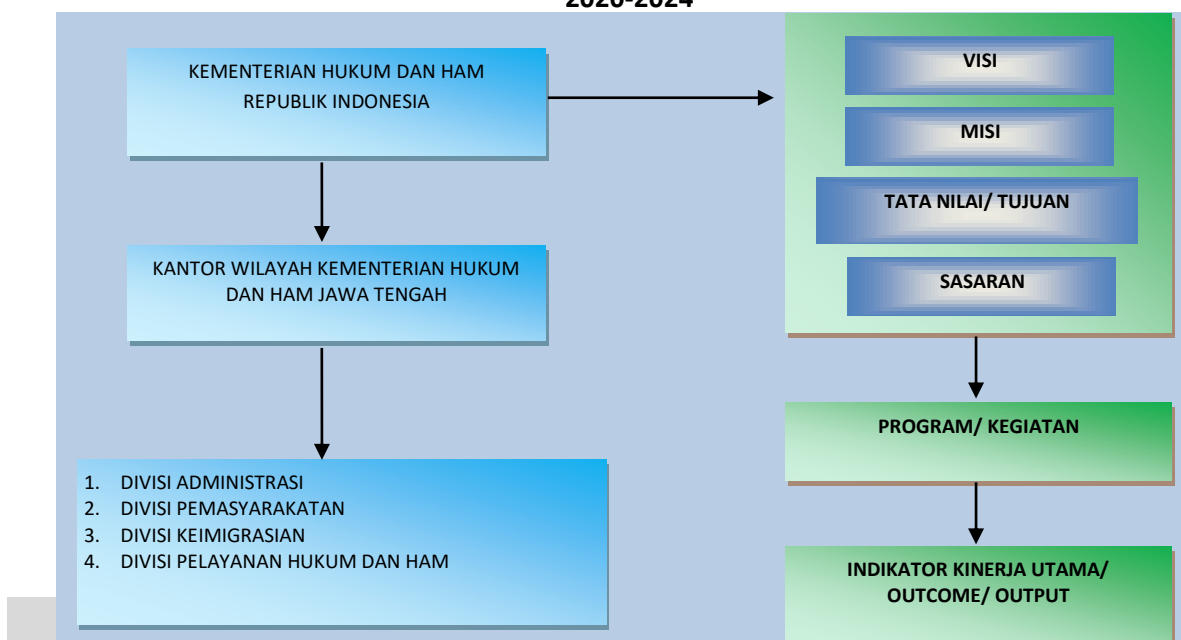


### A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran RPJM ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga ditujukan untuk: menciptakan supremasi hukum; memberdayakan masyarakat untuk sadar Hukum dan HAM; memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah mengadopsi Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagaimana amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

#### RENSTRA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah 2020-2024



## 1. Pernyataan Visi

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- a. mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi
- b. memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- c. menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi
- d. memiliki orientasi kepada masa depan
- e. mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi
- f. menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

- a. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- d. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- e. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka **Visi Pembangunan Nasional** untuk tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan **Visi Kementerian Hukum dan HAM** adalah sebagai berikut:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussines*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan

## 2. Pernyataan Misi

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

### **Misi ke-6 :**

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dukungan Kementerian Hukum

### **Misi ke-7 :**

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

### **Misi ke-8 :**

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
- c. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
- d. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan
- e. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan
- f. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- g. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

### **3. Tata Nilai dan Tujuan**

#### **a. Tata Nilai**

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (disingkat **PASTI**) adalah:

##### **1) Profesional**

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

##### **2) Akuntabel**

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

##### **3) Sinergi**

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

**4) Transparan**

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

**5) Inovatif**

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

**b. Tujuan**

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks Visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian adalah:

- 1) Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana;
- 2) Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 3) Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan Kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;
- 4) Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- 5) Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional;
- 6) Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

**4. Pernyataan Tujuan**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja dalam rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai maka fokus pengerahan seluruh sumber daya kementerian yang mendukung



pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan. Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi;
- b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik ditingkat nasional, propinsi maupun di kabupaten kota;
- d. Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan Kekayaan Intelektual;
- e. Efektifitas peran central authority dalam mendukung kerjasama hukum timbal balik;
- f. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
- g. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin;
- h. Terimplimentasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi manusia (RAN HAM);
- i. Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang transparan dan akuntabel berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### 5. Program/ Kegiatan

Program/ Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Jawa Tengah didasarkan pada 9 (sembilan) Petikan DIPA dari 9 (sembilan) Unit eselon I, yaitu:

##### a. Sekretariat Jenderal

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Hukum dan HAM

##### b. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah

##### c. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

##### d. Direktorat Jenderal Imigrasi

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

##### e. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

**f. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan**

Program Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum

**g. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia**

Program Pemajuan HAM di Kantor Wilayah

**h. Badan Pembinaan Hukum Nasional**

Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Kantor Wilayah

**i. Badan Penelitian dan Pengembangan HAM**

Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Kantor wilayah

**6. Indikator Kinerja Utama/ Outcome/ Output**

Demikian halnya untuk Indikator kinerja utama/outcome/output didasarkan pada 9 (sembilan) petikan DIPA dari 9 (sembilan) unit eselon I:

**a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Sekretaris Jenderal)**

- 1) Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
- 2) Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
- 3) Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

**b. Administrasi Hukum Umum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)**

- 1) Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah
- 2) Persentase layanan program AHU di Kanwil Jawa Tengah yang diselesaikan;

**c. Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan (Direktorat Jenderal Pemasarakatan)**

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan di Jateng
- 2) Persentase mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah Jawa Tengah
- 3) Menurunnya persentase residivis di wilayah Jawa Tengah
- 4) Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah Jawa Tengah;

**d. Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian (Direktorat Jenderal Keimigrasian)**

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Jateng
- 2) Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah;

**e. Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)**

- 1) Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah
- 2) Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah
- 3) Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kanwil;

**f. Pembentukan Hukum (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)**

- 1) Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi
- 2) Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan di wilayah yang mendapatkan pembinaan.

**g. Pemajuan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)**

- 1) Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
- 2) Jumlah Kab/Kota Peduli HAM
- 3) Jumlah instansi pemerintah yang menindak lanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM
- 4) Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah

**h. Pembinaan Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional)**

- 1) Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi
- 2) Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin
- 3) Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah
- 4) Jumlah penyuluhan hukum di daerah
- 5) Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah
- 6) Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN
- 7) Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi

**i. Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum & HAM (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)**

- 1) Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2) Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah.

## B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: No.7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk masing-masing program penyelenggaraan masing-masing Eselon I:

### Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Sekretariat Jenderal)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	7,1
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	85
		3. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	85

Kegiatan:

Pengelolaan Administratif & Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM

Anggaran:

Rp. 18.909.663.000

### Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan (Direktorat Jenderal Pemasarakatan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan diwilayah Jawa Tengah	7,0
2.	Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri	Persentase mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah Jawa Tengah	35%
3.	Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya persentase residivis di wilayahJawa Tengah	1%
4.	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah Jawa Tengah	55%

Kegiatan:

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Anggaran:

Rp. 446.245.492.000

**Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian  
(Direktorat Jenderal Keimigrasian)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah	7,3
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah	2%

Kegiatan:

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Anggaran:

Rp. 56.201.292.000

**Program Administrasi Hukum Umum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah Jawa Tengah yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah	3.0
1.		Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Jawa Tengah yang diselesaikan	80%

Kegiatan:

Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Anggaran:

Rp. 9.803.142.000

**Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual  
(Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	470 Jumlah Permohonan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus

Kegiatan:

Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Anggaran:

Rp. 820.189.000

**Program Pembentukan Hukum (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	20 Raperda
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan di wilayah yang mendapatkan pembinaan	22 Orang

Kegiatan:

Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah

Anggaran:

Rp. 175.265.000

**Program Pemajuan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	587 Orang
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	73 Orang
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukkan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah
		Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	587 Orang

Kegiatan:

Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Anggaran:

Rp. 5.982.046.000

**Program Pembinaan Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan:

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

Anggaran:

Rp. 56.989.000

**Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	15 Instansi Pemerintah
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	5 Kab/Kota
		Jumlah instansi pemerintah yang menindak lanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan:

Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah

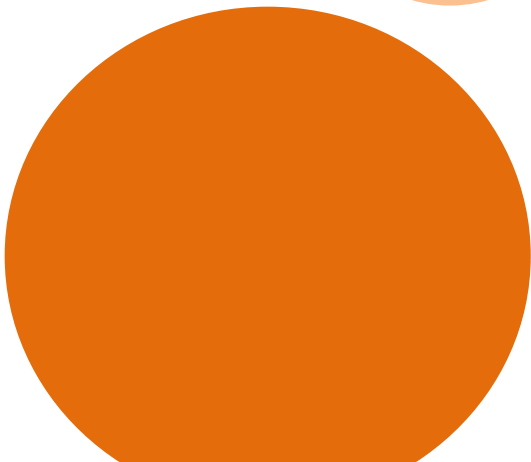
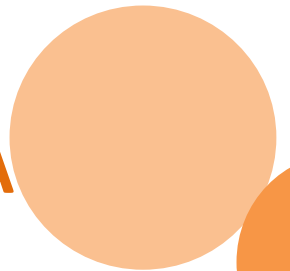
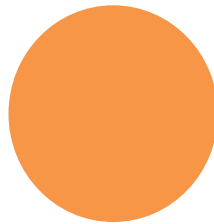
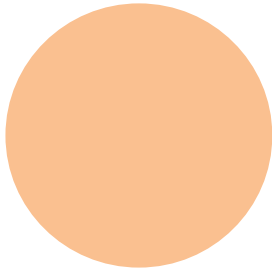
Anggaran:

Rp. 308.738.000



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**





Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

#### **A. Capaian Kinerja**

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

1. Input: segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output: segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. Outcome: indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2020 merupakan realisasi dari rencana kinerja tahun 2020 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome*, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai SS
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Sekretariat Jenderal)</b>					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	7,1	8.9	125.35%	108.45%
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	85	85	100%	
	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	85	85	100%	
<b>Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat (Direktorat Jenderal Masyarakat)</b>					
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Masyarakat di wilayah Jawa Tengah	90%	100%	111.11%	463.71%
Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Masyarakat di wilayah	Persentase UPT Masyarakat yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas masyarakat di wilayah sesuai standar	35%	73%	208.57%	
Terwujudnya Produktivitas Narapidana menuju manusia mandiri yang berdaya guna	Persentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	100%	100%	100%	
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya persentase residivis di wilayah Jawa Tengah	1%	17,9%	1790%	
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah Jawa Tengah	90%	98%	108.89%	
<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian (Direktorat Jenderal Keimigrasian)</b>					
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Jateng	7,3	9.7	130%	954%
Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah	2%	35.5%	178%	
<b>Program Administrasi Hukum Umum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)</b>					
Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah	3	3.0	100%	100%
	Persentase layanan program AHU di	80%	80%	100%	

Wilayah Jawa Tengah yang efektif	Kanwil Jawa Tengah yang diselesaikan				
<b>Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)</b>					
Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	470 Jumlah Permohonan	7.395 Permohonan	1573.40%	254.97%
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder	34 stakeholder	113.33%	
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kanwil	2 Lokus	13 Lokus	650%	
<b>Program Pembentukan Hukum (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan)</b>					
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	20 Raperda	123 Raperda	615%	358%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan di wilayah yang mendapatkan pembinaan	22 Orang	22 Orang	100%	
<b>Program Pembinaan Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional)</b>					
Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	587 Orang	1.878 Orang	319.9%	247.38%
	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	73 Kegiatan	558 Kegiatan	764.38%	
	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kanwil	1 Kanwil	100%	
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kanwil	1 Kanwil	100%	
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kanwil	1 Kanwil	100%	
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDHNN	1 Kanwil	1 Kanwil	100%	
<b>Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)</b>					
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	100%	166.67%	133%
	Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%	
<b>Program Pemajuan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)</b>					
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	15 Instansi Pemerintah	35 Pemerintah Kab/Kota	233%	2028%
	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	5 Kab/Kota	34 Kab/Kota	680%	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindak lanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	71 satuan kerja	7100%	
Meningkatnya rekomendasi perlindungan & pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%	

Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tahun 2020 diantaranya juga terealisasi melalui inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pada kantor wilayah Jawa Tengah melalui:

1. Inovasi Sistem Administrasi Peradilan Pidana Terpadu (SIPPANDU) merupakan sistem informasi yang terintegrasi sejak proses penyidikan, penuntutan, peradilan dan Kemenkumham. Aplikasi SIPPANDU memberikan informasi, kemudahan serta transparansi mengenai Tahanan dan Narapidana yang ada di Jawa Tengah, bekerjasama dengan unsur Integrated Criminal Justice System (ICJS) Jawa Tengah yang tertuang melalui Nota Kesepahaman yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kepala Pengadilan Tinggi Semarang;
2. Inovasi SiLANDU (Sistem Layanan Terpadu) merupakan inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang mengintegrasikan layanan dari 11 eselon I di Kementerian Hukum dan HAM. SiLANDU bertujuan dalam memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam mengakses layanan di Kementerian Hukum dan HAM, kepastian dalam pelayanan, dan akan terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat diakses sampai ke Kelurahan;
3. Merupakan Kantor Wilayah pertama yg *me-Launching* program revitalisasi *Law and Human Rights Center* yang diresmikan oleh Sekretaris Jenderal tanggal 20 Januari 2020;
4. Membangun Aplikasi Sistem Dukungan Manajemen (SIDUKMAN) tentang sinkronisasi penjadwalan, kedisiplinan apel dan kegiatan, pemenuhan kebutuhan: layanan kehumasan atau publikasi, keprotokoleran dan sarpras, serta monitoring agenda dan kinerja UPT.

## B. Dampak Pandemi Covid-19

Semenjak pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia pada minggu kedua bulan Maret 2020 berbagai sektor kegiatan di Indonesia tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung, berdampak kecil maupun masif oleh wabah virus tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengakui Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat mendapat tekanan ekonomi yang sangat besar dan masif. Indonesia mengalami efek domino yang sangat berat, dimana kesehatan berpengaruh ke sosial, sosial berpengaruh ke ekonomi dan ekonomi juga akan mempengaruhi dari sektor keuangan.

Sehingga pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres tersebut merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020. Anggaran dari beberapa kementerian dipotong sebesar Rp 97,42 triliun, termasuk Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang menerima pemotongan anggarannya. Namun, beberapa Kementerian mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar dari Rp 36 triliun menjadi Rp 70 triliun; dan Kementerian Kesehatan dari Rp 57 triliun menjadi 76 triliun.

### 1. Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

Berbagai upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Jawa Tengah dalam mencegah dan menanggulangi Covid-19 antara lain:

1. Melaksanakan Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.OT.04.01 TAHUN 2020 tentang Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Membentuk Tim Gugus Tugas pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada Kantor Wilayah Jawa Tengah;
3. Menerapkan budaya pola hidup sehat;
4. Menerapkan *Physical Distancing* dalam berbagai kegiatan dan berjarak antara minimal 1 (satu) meter untuk pengaturan jarak (meja kerja dan kursi/*workstation*);
5. Menerapkan jadwal WFO/WFH bagi ASN pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja;
  - a. Menyiapkan sarana prasarana layanan sesuai ProKes Covid-19 seperti Bilik sterilisasi, tempat cuci tangan, *Hand Sanitizer*, *Thermo Gun*, Masker APD, *Face Shield*, Vitamin dsb.
  - b. *Sticker* dan *banner* serta video sosialisasi penanganan COVID-19.

6. Melaksanakan rapid tes/ tes PCR Swab bagi seluruh pegawai Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan menggandeng Instansi penyedia layanan tes tersebut.
7. Mewajibkan pegawai yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 untuk melaksanakan isolasi ataupun WFH dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kantor Wilayah Jawa Tengah juga melakukan sinergitas dan kolaborasi dengan instansi terkait serta dengan masyarakat antara lain:

1. Melaksanakan Baksos Kemenkumham dan Jateng peduli kepada masyarakat melalui Pemda Jateng (8.000 butir telur ayam);
2. Jateng peduli kepada WBP kurang mampu yg sedang asimilasi dan integrasi di rumah dengan melibatkan Pemda Kabupaten/Kota;
3. Memproduksi APD untuk RSUD, BNNP, Pemprov Jateng;
4. Pemberdayaan tenaga penyuluh dengan Pemda Jateng dan pasar rakyat;
5. Melaksanakan *rapid test* bekerjasama dengan penyedia layanan;
6. Rakor CJS tentang sistem peradilan pidana, pencegahan dan penanganan pandemi covid-19;
7. Bergabung dalam tim gugus tugas pencegahan Covid-19 Pemda Jateng.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu kementerian yang mengalami pemotongan anggaran khususnya Kantor Wilayah Jawa Tengah juga mengalami pemotongan anggaran yang diperuntukkan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19 yaitu sebesar Rp. 172.645.000,00. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah jumlah pemotongan anggaran pada 4 Satuan Kerja di Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp. 51,143,762,000,00. Sementara jumlah anggaran konsolidasi percepatan penanganan Covid-19 sebagai berikut:

DEKSI	PENCERAIAN	PERANGKAPAN	TOTAL
1.375.128.184	108.358.000	288.380.810	1.771.766.974.000

## 2. Kebijakan Pemerintah dalam bidang Hukum terkait Wabah Covid-19

Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas sistem keuangan yang disebabkan oleh pandemi covid-19 melalui serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang: kesehatan, sosial, fiskal, Perdagangan, UMKM hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tak terkecuali kebijakan dalam bidang Hukum. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan kebijakan di bidang hukum dengan membebaskan 22.158 orang narapidana dan anak. Sebanyak 15.477 orang di antaranya melalui program asimilasi. Sementara 6.681 orang lainnya melalui program hak integrasi, (PB, CB, maupun CMB).

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, Kantor Wilayah Jawa Tengah pada bulan April telah melaksanakan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka

pengecahan dan penanggulangan covid-19 yaitu sebanyak 2.907 WBP. Pemberian asimilasi dilatarbelakangi oleh keadaan penyebaran wabah covid-19 yang semakin meningkat dengan pertimbangan bahwa Narapidana dan Anak menjadi bagian kelompok rentan tertular Covid-19 dan erat kaitannya dengan kondisi Lapas dan Rutan yang *overcapacity* saat ini. Mantan WBP yang menjalani program tersebut merupakan narapidana yang telah mengikuti program pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin selama menjalani pidana atau telah memenuhi syarat administrasi dan substantif.

Pada Semester II tahun 2020 ini Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelontorkan anggaran tambahan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada Satuan Kerja di wilayah Kota Semarang, diantaranya Kantor Wilayah Jawa Tengah, Kantor Imigrasi Semarang, Rumah Detensi Imigrasi Semarang, Balai Harta Peninggalan Semarang, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kumham Jawa Tengah dengan total anggaran sebesar Rp. 1.192.970.000,-, Anggaran tersebut diperuntukkan diantaranya: pelaksanaan rapid tes/tes PCR Swab pegawai, masker, multivitamin, handsanitizer, dan cairan disinfektan.

### C. Analisis Capaian Kinerja

#### 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Sekretariat Jenderal)

Pada tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melaksanakan 1 sasaran strategis yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sebagaimana dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	7,1	8.9	125.35%
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	85	85	100%
	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	85	85	100%



Adapun Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019 dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	70	73	104.29%
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	70	55	78.57%
	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	90	48	53.33%

Indeks kepuasan layanan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah tahun 2020 adalah sebesar 8.9 dari nilai yang ditargetkan sebesar 7,1. Survey kepuasan layanan internal Kantor Wilayah Jawa Tengah dilaksanakan dengan jumlah responden sebanyak 76 orang responden yang berasal dari lingkup internal pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang terdiri dari pegawai di divisi Pemasarakatan, divisi Keimigrasian dan dari divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap pelaksanaan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Dalam kuesioner tersebut mengukur sejauh mana unsur Ketanggapan dalam pelayanan (*Responsiveness*), Keandalan dalam pelayanan (*Reliability*), Kepastian dalam pelayanan (*Assurance*), Sikap dalam pelayanan (*Empathy*), serta Sarana dan Prasarana dalam pelayanan (*Tangible*) oleh Divisi Administrasi dengan total 100 pertanyaan yang terdiri dari 10 pertanyaan terhadap layanan Sub Bagian Program dan Pelaporan, 10 pertanyaan terhadap layanan Sub Bagian Humas, RB, dan TI, 10 pertanyaan terhadap layanan Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan BMN serta 10 pertanyaan terhadap layanan Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga. Berdasarkan hasil survey kepuasan internal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah terhadap layanan internal adalah sangat baik dengan nilai 8.9 (8.31 – 10 nilai persepsi sangat baik).

Target : 7.1

Capaian Kinerja : 8.9

Persentase Realisasi :  $8.9/7.1 \times 100\% = 125.35\%$

Inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Jawa Tengah yaitu membangun Aplikasi Sistem Dukungan Manajemen (SIDUKMAN) yang dapat dimanfaatkan dalam sinkronisasi penjadwalan, informasi kedisiplinan apel dan kegiatan, pemenuhan kebutuhan: layanan kehumasan atau publikasi, keprotokoleran dan sarpras, serta monitoring agenda dan kinerja UPT. Tidak hanya itu Kantor wilayah Jawa Tengah juga melakukan inovasi dengan menjadi kantor wilayah pertama yg me-*Launching* program revitalisasi *Law and Human Rights Center* yang diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 20 Januari 2020. Kantor wilayah Jawa Tengah juga membangun Aplikasi Sistem Layanan Terpadu (SILANDU) yang berisi tentang layanan publik kanwil Jateng terdiri dari: publikasi kegiatan kanwil dan upt; Informasi layanan (pengertian, persyaratan dan mekanisme); Pengaduan masyarakat dan internal; Informasi data notaris seluruh Jawa Tengah, informasi kegiatan notaris, pengaduan masyarakat kepada notaris, penyampaian laporan kinerja notaris dan konsultasi melalui percakapan virtual; Permohonan ijin peneitian; Permohonan pelantikan notaris dan PPNS; Verifikasi dan konsultasi layanan KI; dan survey.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah selama tahun 2020 diantaranya adalah:

- a. Apel deklarasi janji kinerja dan pencaangan zona integritas tanggal 20 Januari 2020;
- b. Penguatan, sosialisasi & internalisasi Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Rapat pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. Rapat penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- f. Kegiatan-kegiatan Penguatan dan pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas oleh Kantor Wilayah ke satuan kerja di wilayah Jawa Tengah; serta
- g. Telah diselesaikannya seluruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) pada kantor wilayah dan satuan kerja.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan zona integritas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah maka dibentuklah tim kerja melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor: W13-18.OT.03.01 Tahun 2020 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2020. Tim kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertugas: melaksanakan hal-hal yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud; melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Kepala Kantor Wilayah. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi: Manajemen Perubahan; Penataan Tata

Laksana; Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Penguatan Pengawasan; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah belum dapat terealisasi karena belum mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Jawa Tengah telah berupaya diantaranya mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan laporan kinerja oleh Biro Perencanaan.

Upaya perbaikan dalam mendukung terpenuhinya capaian target kinerja diantaranya adalah mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas pelayanan internal kantor wilayah melalui perbaikan sarana prasarana, peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan, berkoordinasi dengan Eselon I terkait Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah, mengoptimalkan peran dari Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Kantor Wilayah melalui pelatihan SDM dan sosialisasi/penguatan penyusunan laporan kinerja pemerintah.

## 2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan (Direktorat Jenderal Pemasarakatan)

Capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja Tahun 2020 merupakan realisasi dari rencana kinerja Tahun 2020 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome*, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan diwilayah Jawa Tengah	90%	100%	111.11%
Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan di wilayah	Persentase UPT Pemasarakatan yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar	35%	73%	208.57%
Terwujudnya Produktivitas Narapidana menuju manusia mandiri yang berdaya guna	Persentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	100%	100%	100%

Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya persentase residivis di wilayah Jawa Tengah	1%	17,9%	1790%
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah Jawa Tengah	90%	98%	108.89%

Berikut merupakan target dan realisasi capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan Jawa Tengah	90%	100%	111.11%
Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri	Persentase Narapidana/Anak dan Klien Pemasarakatan yang Berdaya Guna Setelah Bebas	30%	100%	333.33%
Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan	Menurunnya Persentase Residivis	10%	100%	1000%
Meningkatnya Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana, Pelayanan Tahanan, Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Basan Baran Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi dan Pengelolaan Basan Baran Sesuai Dengan Standar Jawa Tengah	90%	100%	111.11%
Meningkatnya Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana, Pelayanan Tahanan, Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Tahanan, Bantuan Hukum dan Bimbingan Kegiatan Sesuai Dengan Standar Jawa Tengah	90%	100%	111.11%
	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Pembinaan Kepribadian Sesuai Dengan Standar Jawa Tengah	90%	100%	111.11%
	Persentase Anak Yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai Dengan Standar Jawa Tengah	90%	100%	111.11%
	Persentase Klien Yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai Dengan Standar Jawa Tengah	90%	100%	111.11%
	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasarakatan Sesuai Dengan Standar Jawa Tengah	90%	100%	111.11%

Sedangkan untuk tahun 2019 capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja 2020 dikarenakan terdapat indikator/target dengan output yang berbeda.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 100 dari nilai indeks yang ditargetkan sebesar 90 hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan di wilayah Jawa Tengah yang didukung dengan berbagai upaya yang telah dilakukan salah satunya peningkatan sarana prasarana pelayanan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasarakatan di Jawa Tengah.

Target	: 90
Capaian Kinerja	: 100
Realisasi	: $100/90 \times 100 \% = 111.11 \%$

Persentase mantan narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan sebesar 73% dari besaran target 35%. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan kerjasama dari berbagai pihak dalam membangun mental, kepribadian, dan keterampilan mantan narapidana selama menjalani masa pidananya. Selama tahun 2020 Satuan Kerja Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah telah melaksanakan berbagai pelatihan dengan jumlah 3.145 peserta, diantaranya sejumlah 536 merupakan peserta bersertifikasi.

Target	: 35%
Capaian Kinerja	: 73%
Realisasi	: $73/35 \times 100 \% = 208.57\%$

Menurunnya persentase residivis di wilayah Jawa Tengah sebesar 17,9% dari target penurunan sebesar 1% (Jumlah residivis: 2.037/11.378 dikali 100%) yang mengindikasikan mantan narapidana/anak yang taat hukum.

Target	: 1%
Capaian Kinerja	: 17.9%
Realisasi	: $17.9/1 \times 100 \% = 1790\%$

Persentase jumlah anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah jawa tengah adalah sebesar 98% dari target sebesar 90%. Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah anak yang melanjutkan pendidikannya antara lain disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor sosial.

Target	: 90%
Capaian Kinerja	: 98%
Realisasi	: $98/90 \times 100 \% = 108.89\%$

Keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam mencapai target kinerja yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tidak terlepas dari peran seluruh SDM jajaran Kantor Wilayah dalam mengawal setiap sasaaran dan indikator kinerja.

Upaya yang akan dilakukan kantor wilayah dalam meningkatkan capaian kinerja diantaranya meningkatkan kualitas layanan pemsarakatan di wilayah jawa tengah, bekerjasama dengan lembaga/intansi pelatihan dan pendidikan dalam memberikan keterampilan, pelatihan serta pendidikan kepada klien dan warga binaan pemsarakatan di wilayah jawa tengah agar memiliki peluang yang lebih baik dalam memperoleh kesempatan mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pendidikannya. Mengoptimalkan peran dan fungsi dari Forum Dilkumjarkpol di wilayah Jawa Tengah.

### 3. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian (Direktorat Jenderal Keimigrasian)

Capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah	7.3	9.7	132.88%
Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah	2%	35.5%	1775%

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian menggunakan formulasi rata rata nilai IKM Unit Pelayanan pada UPT Keimigrasian Se Jawa Tengah

Target : 7.3

Persentase Realisasi :  $9.7/7.3 \times 100 \% = 132.9 \%$

Capaian Kinerja : 9.7

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian menggunakan formulasi rata rata nilai IKM Unit Pelayanan pada UPT Keimigrasian Se Jawa Tengah karena pada Divisi Keimigrasian tidak terdapat mesin survey kepuasan masyarakat. Nilai Rata Rata IKM telah memenuhi target Perjanjian Kinerja. Nilai IKM selama Semester II sebagai berikut:

No	Kantor Imigrasi	TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		RESPONDEN	IKM	IPK	RESPONDEN	IKM	IPK
1.	Kanim TPI Kelas I Semarang	185	9.61	9.61	167	9.85	9.85
2.	Kanim TPI Kelas I Surakarta	76	9.06	8.96	3	9.89	9.75
3.	Kanim TPI Kelas II Cilacap	169	9.44	9.32	116	9.68	9.54
4.	Kanim Non TPI Kelas II Wonosobo	61	9.93	9.88	82	9.57	9.59
5.	Kanim Non TPI Kelas I Pemalang	126	9.93	9.88	19	9.79	9.75
6.	Kanim Non TPI Kelas II Pati	70	9.79	9.76	18	9.42	9.47
7.	Rudenim Semarang	125	9.77	9.68	32	9.94	9.87

Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah jawa tengah adalah sebesar 7.8 dari target indeks sebesar 7.3, berbagai upaya telah dilakukan satker keimigrasian dalam meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian melalui peningkatan sarana prasarana, pelayanan berbasis online, informasi melalui media sosial, dsb. Guna mendukung dan meningkatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dalam membuat paspor Kantor Imigrasi Semarang menghadirkan inovasi Aplikasi SiSemar Layak yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan paspor, dengan cara mengisi formulir pengajuan secara online dan melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan ke aplikasi tersebut. Setelah itu, petugas melakukan pemeriksaan secara daring

dokumen tersebut. Ketika semua persyaratan disetujui pemohon dapat langsung datang ke Kantor Imigrasi Semarang untuk melakukan foto dan pemindaian sidik jari.

Jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan menggunakan formulasi jumlah penyelesaian TAK dan penyidikan pada UPT Keimigrasian Se Jawa Tengah

Target 2020	: Penurunan 2% dari realisasi 2019
Realisasi 2020	: 89
Realisasi 2019	: 140
Target Semester II 2020	: 138
Penurunan Realisasi	: $138 - 89 = 49$
	: $49/138 \times 100 \% = 35.5 \%$

Analisis Indikator Kinerja persentase penurunan pelanggaran keimigrasian di wilayah Jawa Tengah menggunakan formulasi penurunan jumlah penyelesaian TAK dan penyidikan pada UPT Keimigrasian Se Jawa Tengah dengan target realisasi Tahun 2019. Persentase penurunan melebihi target Perjanjian Kinerja sehingga jumlahnya lebih kecil 35.5 % dari target tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- Efektifnya kegiatan Rapat Koordinasi Tim PORA dan penguatan Tim PORA serta sosialisasi/diseminasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian dan Divisi Keimigrasian
- Pandemi Covid 19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan dan terdapat kelonggaran regulasi mengenai izin tinggal.

Jumlah Pemberian TAK Sampai dengan Desember 2020:

No	Kantor Imigrasi	Capaian Kinerja Penyelesaian TAK	
		Target	Realisasi
1.	Kantor Imigrasi TPI Kelas I Semarang	14	21
2.	Kantor Imigrasi TPI Kelas I Surakarta	6	8
3.	Kantor Imigrasi TPI Kelas II Cilacap	11	17
4.	Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Pemalang	24	15
5.	Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Wonosobo	4	3
6.	Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Pati	8	4
7.	Rudenim	3	19
Jumlah			87

No	Kantor Imigrasi	Capaian Kinerja Penyidikan Keimigrasian	
		Target	Realisasi
1.	Kantor Imigrasi TPI Kelas I Semarang	13	2
2.	Kantor Imigrasi TPI Kelas I Surakarta	0	0
3.	Kantor Imigrasi TPI Kelas II Cilacap	0	0
4.	Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Pemalang	1	0
5.	Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Wonosobo	0	0
6.	Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Pati	0	0
Jumlah			2



Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2019 dan Tahun 2018:

Indikator Kinerja 2020	Realisasi Kinerja 2020	Indikator Kinerja 2019	Realisasi Kinerja 2019	Indikator Kinerja 2018	Realisasi Kinerja 2018
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah	7.8	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	304.728	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian	12
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	8.5		
Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah	28.5%	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	84		

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Rekapitulasi Pegawai Divisi Keimigrasian):

No	Gol	Pangkat				Struktural	Non Struktural	Fungsional	Jumlah
		a	b	c	d				
1.	IV	1	3	-	-	3	-	1	20
2.	III	1	5	3	4	4	7	2	
3.	II	1	-	1	1	-	3	-	
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		1	8	4	5	7	10	3	

Adapun analisis atas efisiensi pengguna sumber daya sebagai berikut:

a. Terdapat satu jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Madya, satu jabatan Fungsional Keimigrasian Pertama, satu jabatan fungsional Penerjemah Pertama;

b. Terdapat satu pegawai dengan jabatan pelaksana yang diperbantukan pada Divisi Keimigrasian;

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja: Program Divisi Keimigrasian adalah Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian berikut hal hal yang menunjang tercapainya pernyataan kinerja Divisi Keimigrasian

a. Keberhasilan dalam indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian ditunjang oleh kegiatan penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian pengelolaan SDM, sarana prasarana dan administrasi keuangan serta kegiatan pembinaan, pengendalian berupa internalisasi yang rutin dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian pada UPT Keimigrasian tentang peningkatan pelayanan publik

b. Keberhasilan penurunan pelanggaran keimigrasian ditunjang oleh kegiatan pembinaan, pengendalian, kerjasama bidang teknis keimigrasian yang dilakukan oleh divisi keimigrasian dan UPT Keimigrasian

#### 4. Program Administrasi Hukum Umum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)

Berikut merupakan Target dan Realisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun 2020:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah Jawa Tengah yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah	3.0	3.0	100%
	Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Jawa Tengah yang diselesaikan	80%	80%	100%

Sedangkan target dan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terselenggaranya Administrasi Jasa Hukum di Wilayah	Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Pelayanan Balai Harta Peninggalan	12 Laporan	12 Laporan	100 %

Berdasarkan kedua tabel diatas maka target dan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah antara tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dikarenakan perbedaan indikator output.

Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tahun 2020 pada indikator kinerja indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan target indeks sebesar 3.0 tercapai sebesar indeks 3.0. Upaya kantor wilayah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU yaitu melalui kegiatan dialog Interaktif Kebijakan Pelaporan *Beneficial Ownership* serta FGD pedoman pendaftaran/pengesahan badan usaha berbadan hukum yang dilaksanakan secara *virtual*.

Target : 3.0

Capaian Kinerja : 3.0

Persentase Realisasi :  $3.0/3.0 \times 100 \% = 100\%$

Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang terselesaikan sebanyak 50% dari target capaian sebesar 80%. Dikarenakan pandemi covid-19 yang sedang mewabah pelayanan program pada kantor wilayah

kurang optimal, serta ditetapkan sebagai kota Semarang sebagai wilayah zona merah covid-19 di Jawa Tengah sehingga diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) meskipun demikian kantor wilayah tetap berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Target	: 80%
Capaian Kinerja	: 80%
Realisasi	: $80/80 \times 100 \% = 100\%$

Kegiatan Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang dilaksanakan berupa kegiatan Sosialisasi Layanan Fidusia, Layanan Kewarganegaraan, Layanan Kenotariatan dan Layanan Administrasi Hukum Umum lainnya. Keberhasilan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam dilakukan oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah Jawa Tengah dalam berkoordinasi dan bersinergi sebagai satu organisasi.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan mewujudkan penyebaran informasi dan pelayanan, kantor wilayah akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka penyebaran informasi agar lebih efektif. Melakukan upaya perbaikan pelayanan serta sosialisasi agar Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU dapat meningkat.

##### 5. Program Pembentukan Hukum (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan)

Berikut merupakan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah DIPA Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan:

Sasaran Strategis	Indikator Output	Target	Realisasi	%
Terfailitasinya rancangan produk hukum di daerah	Presentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfailitasi sesuai permohonan	20 Raperda	123 Raperda	615%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan di wilayah yang mendapatkan pembinaan	22 orang	22 orang	100%

Berdasarkan tabel diatas jumlah persentase target rancangan peraturan daerah yang terfailitasi sesuai permohonan pada tahun 2020 adalah sebesar 615% dimana Kantor Wilayah Jawa Tengah berhasil merealisasikan rancangan peraturan daerah yang telah terfailitasi sebesar lebih dari 100% dari jumlah permohonan (123 Raperda dari target 20 Raperda).

Target	: 20 Raperda
Capaian Kinerja	: 123 Raperda

Persentase Realisasi :  $123/20 \times 100\% = 615\%$

Sedangkan jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan pembinaan sejumlah 22 orang dari target 22 orang.

Target : 22 Orang

Capaian Kinerja : 22 Orang

Persentase Realisasi :  $22/22 \times 100\% = 100\%$

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Antara Tahun 2019 dan 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah DIPA Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan disajikan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Output	2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Presentase rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan	80	100%	20	>100%
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah	50 orang	100%	22 orang	>100%

Pada tahun 2020 Kantor Wilayah Jawa Tengah mampu merealisasikan sebesar lebih dari 100% dari seluruh indikator output yang telah ditargetkan sebagaimana capaian realisasi pada tahun 2019. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki Kantor Wilayah Jawa Tengah diantaranya berupa:

- Jumlah SDM perancang peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan analisis beban kerja pada Kantor Wilayah Jawa Tengah yang dapat meningkatkan kualitas output
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah

Keberhasilan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam mencapai target indikator yang ditetapkan pada tahun 2019 tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya:

- Koordinasi yang terarah, baik untuk tingkat pusat, internal dan eksternal.
- Keterlibatan seluruh jajaran pimpinan dan staf baik Kantor Wilayah dalam pelaksana kegiatan, yang merupakan bentuk implemtasi tata nilai Sinergi, kerjasama dan kebersamaan dalam pelaksanaan kegiatan.
- komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai mitra kerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM dalam pelaksanaan

pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur/Bupati/Walikota.

- d. Pembatasan kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya banyak orang dalam suatu tempat dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah ditunda.

Sedangkan dari analisis efisiensi penggunaan sumber daya dapat dirangkum sebagai berikut bahwa:

- a. Jumlah sumberdaya manusia perancang peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan analisis beban kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng yang dapat meningkatkan kualitas output.
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- a. Upaya keberhasilan memenuhi kinerja dengan telah difasilitasinya 35 Rancangan Peraturan Daerah dari target 20 Rancangan Peraturan Daerah adalah dengan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait (Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Provinsi, dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota) melalui acara Sosialisasi undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah dengan target 22 Perancang Peraturan Perundang-undangan belum dapat direalisasikan dikarenakan kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah baru akan dilaksanakan bulan Juli 2020 melalui *virtual meeting*.

Kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yaitu Kondisi Pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan yang melibatkan kerumunan dan berkumpulnya orang menyebabkan tertundanya kegiatan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah sehingga dipandang perlu untuk mengalihkan kegiatan melalui media *virtual meeting*.

Upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja kedepannya yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitasi rancangan produk hukum di daerah melalui peningkatan kualitas SDM, kemudahan dalam mengakses layanan, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas serta peran pembinaan perancang peraturan perundang-undangan melalui pelatihan dan pendidikan.

## 6. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

Berikut merupakan target dan realisasi dari Kantor Wilayah Jawa Tengah DIPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2020:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	470 Jumlah Permohonan	7.395 Permohonan	1573.40%
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder	34 stakeholder	113.33%
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	13 Lokus	650%

Sedangkan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Output	Target 2019	Realisasi	Capaian (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel	% permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang diterima	100%	599 permohonan	100%
	% pengiriman dokumen	100%	0	0%
	% kegiatan workshop Promosi dan Diseminasi KI	100%	4 kegiatan	100%
	% mendampingi pengajuan permohonan KI	100%	2 kegiatan	100%
	% kegiatan inventarisasi data Kekayaan Intelektual Komunal	100%	1 kegiatan	100%
	% kegiatan pengawasan IG	100%	1 kegiatan	100%
	% kegiatan pengamatan wilayah terhadap potensi pelanggaran KI	100%	1 kegiatan	100%
	% kegiatan Workshop Pencegahan/Pelanggaran KI	100%	2 kegiatan	100%
	% kegiatan Penyelidikan/Penyidikan/Pengawasan Pelanggaran HKI	100%	2 kegiatan	100%
	% penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan	100%	1 kegiatan	100%

Dari tabel target dan realisasi perjanjian kinerja antara tahun 2020 dengan realisasi perjanjian kinerja tahun 2019 diatas keduanya tidak dapat dibandingkan dikarenakan sasaran dan indikator output yang berbeda.

Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

sampai dengan tahun 2020 yaitu telah tercapai 1.573.40% dari target 470 permohonan dari target yang tertuang dalam perjanjian kinerja, diantaranya jumlah permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang diterima Kantor Wilayah Jawa Tengah tahun 2020 ditargetkan sebanyak 470 pemohon dengan realisasi jumlah permohonan pendaftaran sebanyak 7.395 pemohon yang telah dilayani Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis	Jumlah Permohonan
1.	Merek	3.514
2.	Hak Cipta	3.577
3.	Paten	183
4.	Desain Industri	121
	<b>TOTAL</b>	<b>7.395</b>

Target : 470 Permohonan  
 Capaian Kinerja : 7.395 Permohonan  
 Persentase Realisasi :  $7.395/20 \times 100\% = 1573.40\%$

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para stakeholder kekayaan intelektual oleh kantor wilayah yaitu sebanyak 34 stakeholder dari jumlah target stakeholder sebanyak 30 stakeholder. Sosialisasi Kekayaan Intelektual Sebagai Pendorong Peningkatan Perekonomian di Daerah di Semarang dan dialog interaktif sebanyak 10 (sepuluh) kali..

Target : 30 Stakeholders  
 Capaian Kinerja : 34 Stakeholders  
 Persentase Realisasi :  $34/30 \times 100\% = 113.33\%$

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemajuan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Wilayah Jawa Tengah dilaksanakan tanggal 26 Februari 2020 ditandatangani oleh 10 Bupati Walikota (Kota Tegal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, Kabupaten Wonogiri).

Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah tahun 2020 adalah sebanyak 13 lokus dari target sebanyak 2 lokus diantaranya Kota Surakarta, Kota Megelang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Banyumas.

Target : 2 Lokus  
 Capaian Kinerja : 13 Lokus  
 Persentase Realisasi :  $13/2 \times 100\% = 650\%$

Di masa pandemi covid-19 kegiatan yang mengharuskan tatap muka langsung dialihkan ke *virtual meeting* guna mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan pelaksanaan kegiatan pencegahan



pelanggaran kekayaan intelektual dapat kembali dilaksanakan pada I tahun 2020.

Sebagai upaya dalam mencapai target kinerja kantor wilayah melakukan beberapa hal diantaranya peningkatan pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas dengan mengupayakan percepatan penyelesaian permohonan kekayaan intelektual, pelaksanaan diseminasi dan promosi kepada para stakeholder, serta pelaksanaan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual.

#### 7. Program Pemajuan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)

Adapun rincian perencanaan kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah terlihat pada tabel Perencanaan Kinerja tahun 2020 sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	15 Instansi Pemerintah	35 Pemerintah Kab/Kota	233.33%
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	5 Kab/Kota	34 Kab/Kota	850%
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah instansi pemerintah yang menindak lanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	71 satuan kerja	7100%
	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%

Berikut merupakan target dan capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tahun 2019:

Sasaran Strategis	Indikator Output	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)
Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi HAM	Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi HAM	4 Pemda	35 Pemda	875%
	Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	3 Pemda	34 Pemda	1.133,3%
Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1 Layanan	1 Layanan	100%

Perbandingan capaian kinerja dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah mampu merealisasikan

indikator sebesar lebih dari 100%. Dan sebagaimana pada tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah juga mampu merealisasikan target kinerja sebesar lebih dari 100%.

Pada sasaran strategis meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM dengan indikator kinerja jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM dengan target sebesar 15 instansi pemerintah telah terlaksana sebanyak 35 pemerintah daerah kab/kota.

Target	: 15 Instansi Pemerintah
Capaian Kinerja	: 35 Pemerintah Kab/Kota
Persentase Realisasi	: $35/15 \times 100\% = 233.33\%$

Sedangkan jumlah kab/kota peduli HAM dengan target sebanyak 5 kab/kota telah terlaksana sebanyak 34 kab/kota (100%) yang terdiri dari 28 Kabupaten dan 6 Kota.

Target	: 5 Pemerintah Kab/Kota
Capaian Kinerja	: 34 Pemerintah Kab/Kota
Persentase Realisasi	: $34/5 \times 100\% = 850\%$

Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM telah terlaksana pada 71 satuan kerja (100%) dari target 1 instansi pemerintah.

Target	: 1 Instansi Pemerintah
Capaian Kinerja	: 71 Satker
Persentase Realisasi	: $71/1 \times 100\% = 7100\%$

Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah telah terlaksana 3 rekomendasi dari target sebanyak 3 rekomendasi (100%).

Target	: 3 rekomendasi
Capaian Kinerja	: 3 rekomendasi
Persentase Realisasi	: $3/3 \times 100\% = 100\%$

Keberhasilan Kantor Wilayah Jawa Tengah dalam mencapai target kinerja tahun 2020 tentunya tidak lepas dari dukungan pimpinan, instansi terkait dan sumber daya manusia di Kantor Wilayah yang dapat dioptimalkan sebaik mungkin, serta selalu berupaya untuk membangun komunikasi yang baik dengan instansi pemerintah lainnya.

Realisasi dari jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM adalah sejumlah 35 Pemda dari target 2020 yaitu sebesar 5 Pemda, jumlah Kab/Kota peduli HAM juga telah melampaui target 2019 dari 3 Kab/Kota sebanyak 34 Kab/Kota telah Peduli HAM. Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah telah terpenuhi sebesar 100 %. Keberhasilan Kantor Wilayah Jawa Tengah dalam mencapai target kinerja tahun 2020 tentunya tidak lepas dari dukungan pimpinan, instansi terkait dan sumber daya manusia di Kantor Wilayah yang dapat dioptimalkan

sebaik mungkin, serta selalu berupaya untuk membangun komunikasi yang baik dengan instansi pemerintah lainnya.

Pada tahun 2020 Kantor Wilayah Jawa Tengah menangani sebanyak 3 Penanganan Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM yaitu: 1 Hak Mengembangkan Diri, 1 Hak Atas Kesejahteraan, dan 1 Hak Anak yang telah terselesaikan pada tahun 2020.

Beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaan program aksi HAM di wilayah diantaranya kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki khususnya SubBid Pemajuan HAM yang tentunya akan berdampak pada kinerja pencapaian target tahun 2020. Kendala lainnya yaitu jumlah anggaran yang tidak seimbang dengan permasalahan yang dihadapi terutama terkait Yankomas.

Dari beberapa permasalahan tersebut Kantor Wilayah Jawa Tengah melakukan beberapa upaya untuk mencari solusi terbaik diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan bidang lain terutama terkait Yankomas serta mendorong terselesaikannya Yankomas oleh Pemerintah Daerah. Terkait permasalahan anggaran Kantor Wilayah Jawa Tengah berupaya untuk mengusulkan penambahan anggaran kepada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia untuk tahun depan.

Sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja kantor wilayah melalui peningkatan jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM dengan berkoordinasi dengan Pemda di wilayah jawa tengah, meningkatkan kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM, meningkatkan rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM, mendorong peningkatan jumlah Kab/Kota Peduli HAM, koordinasi dan mendorong instansi pemerintah yang menindak lanjuti hasil Diseminasi, meningkatkan rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

#### 8. Program Pembinaan Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional)

Berikut merupakan target beserta realisasi capaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah DIPA Direktorat Jenderal Badan Pembinaan Hukum Nasional selama tahun 2020:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	587 Orang	1.878 Orang	319.93%
	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	73 Kegiatan	558 Kegiatan	764.38%
	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%

	produk hukum daerah			
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%

Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah terkait pembinaan hukum di wilayah Jawa Tengah dengan indikator kinerja Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi telah terlaksana lebih dari 100% atau terealisasi sebanyak 1.878 orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi selama tahun 2020.

Target	: 1.878 Orang
Capaian Kinerja	: 587 Orang
Persentase Realisasi	: $1.878/587 \times 100\% = 319.93\%$

Jumlah kegiatan Bantuan non-Litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin telah terlaksana juga lebih dari 100% dengan jumlah 558 kegiatan dari target sebesar 73 kegiatan.

Target	: 73 Kegiatan
Capaian Kinerja	: 558 Kegiatan
Persentase Realisasi	: $558/73 \times 100\% = 764.38\%$

Sedangkan sasaran strategis berupa Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah, Jumlah penyuluhan hukum di daerah, Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah, dan Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN masing-masing telah terlaksana 1 kegiatan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Target	: 1 Kantor Wilayah
Capaian Kinerja	: 1 Kantor Wilayah
Persentase Realisasi	: $1/1 \times 100\% = 100\%$

Berikut merupakan target dan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pada tahun 2019:

Sasaran Strategis	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Pembinaan dan Pembangunan Hukum dan Tingkat Daerah dengan didukung Perencanaan Hukum di Tingkat Daerah;	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	481 Orang	949 Orang	197%
	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin	49 Kegiatan	194 Kegiatan	395%

Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah; Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Terselenggaranya Bantuan Hukum serta tersedianya Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Daerah	1 Daerah	100%
	Jumlah penyuluhan hukum di Daerah	1 Daerah	1 Daerah	100%
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Daerah	1 Daerah	100%
	Terselenggaranya Pelatihan/Peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	50 peserta	50 peserta	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah mampu merealisasikan seluruh target kinerja sebesar lebih dari 100%. Sebagaimana pula pada tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah juga mampu merealisasikan seluruh target kinerja dengan capaian lebih dari 100%.

Selama tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana dikarenakan beberapa kendala salah satunya karena pandemi covid-19 sehingga kegiatan seperti pengawasan pelaksanaan bantuan hukum, penyuluhan hukum, perencanaan pembentukan produk hukum daerah dan layanan informasi hukum melalui system JDIHN belum dapat terlaksana pada tahun 2020, diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana pada tahun 2020.

Analisa Penyebab Keberhasilan serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target kinerja diantaranya:

- a. Optimalisasi SDM pelaksana Bantuan Hukum yang jumlahnya terbatas, optimalisasi tugas dan fungsi Penyuluh Hukum untuk melaksanakan penyuluhan hukum dan pembinaan serta mendorong pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- b. Terjalinnnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta dengan Organisasi Bantuan Hukum pelaksana kegiatan pemberian Bantuan Hukum.
- c. Terjalinnnya koordinasi dan komunikasi yang baik secara internal antara pelaksana kegiatan di Bidang Hukum dengan Bidang/Divisi lain.

Dalam upaya mencapai kinerja tahun 2020 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tak lepas dari beberapa permasalahan yang muncul diantaranya kurangnya keaktifan Pemberi bantuan Hukum serta Aplikasi sidbankum yang terkadang sering mengalami gangguan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melakukan upaya dengan cara menerapkan proses pencairan yang lebih sederhana sehingga OBH lebih mudah dan melaksanakan pemberian bantuan hukum, serta melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan admin sidbankum pusat.

### 9. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	100%	100%
	Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia tercapai sebesar 60% dari target sebesar 60%, yang artinya Kantor Wilayah Jawa Tengah mampu melaksanakan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020.

Target : 60% Kantor Wilayah  
 Capaian Kinerja : 100%  
 Persentase Realisasi :  $100/60 \times 100\% = 166.67\%$

Sedangkan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah tercapai 100% dari target yang berupa 1 buah buku.

Target : 1 Buku  
 Capaian Kinerja : 1 Buku  
 Persentase Realisasi :  $1/1 \times 100\% = 100\%$

Berikut merupakan perbandingan Target dan Realisasi Kinerja antara Tahun 2019 dan 2020 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah:

Sasaran Strategis	Indikator Output	2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Prosentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	20%	50%	60%	100%

Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku
---	--	--------	--------	--------	--------

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja antara tahun 2020 dan tahun 2019 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah hanya mampu merealisasikan sebesar 50% dari target 20% sedangkan pada tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah mampu merealisasikan sebesar 100% dari target 60% pada tahun 2020. Sedangkan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM dengan target yang sama yaitu sebanyak 1 buku telah tercapai sebanyak 1 buku pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Keberhasilan Kantor Wilayah Jawa Tengah dalam mencapai target kinerja pada tahun 2020 tidak terlepas dari adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Unit Eselon I Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dengan pelaksana pada Kantor Wilayah, serta kerja sama yang baik antara pelaksana dengan pengelola keuangan, capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala diantaranya berupa anggaran dan jumlah SDM yang terbatas.

Kantor wilayah akan terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui hasil penelitian dan pengkajian di wilayah guna direkomendasikan sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia di wilayah dengan menjaga komunikasi dan koordinasi dengan unit eselon I.

### C. Realisasi Anggaran

Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 9 (sembilan) Petikan DIPA dari masing-masing unit Eselon I. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

NO	PROGRAM (ESELON I)	2020				2019			
		PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	SISA TOTAL (RP)	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	SISA TOTAL (RP)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Sekretariat Jenderal)	23,737,631,000	23,573,825,683	99.31	163,805,317	18.329.758.000	18.229.478.364	99.45	100.279.636
2	Administrasi Hukum Umum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	3,139,000,000	3,087,931,430	98.37	51,068,570	3.500.000.000	3.489.031.091	99.69	10.968.909
3	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan (Direktorat Jenderal Pemasarakatan)	1,086,765,000	1,077,746,787	99.17	9,018,213	1.156.960.000	1.148.303.202	99.25	8.656.798
4	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian (Direktorat	1,241,298,000	776,303,901	62.54	464,994,099	1.203.000.000	1.171.705.215	97.40	31.294.785

	Jenderal Keimigrasian)								
5	Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	820,189,000	772,119,689	94.14	48,069,311	270.072.000	266.235.370	98.58	3.836.630
6	Pembentukan Hukum (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	175,265,000	174,053,183	99.31	1,211,817	210.680.000	209.663.047	99.52	1.016.953
7	Pemajuan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)	308,738,000	308,036,216	99.77	701,784	308.738.000	307.032.549	99.45	1.705.451
8	Pembinaan Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	6,189,016,000	6,183,217,624	99.91	5,798,376	6.311.966.000	6.200.645.260	98.24	111.320.740
9	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum & HAM (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)	56,989,000	56,914,425	99.87	74,575	39.080.000	39.019.615	99.85	60.385
<b>Jumlah</b>		<b>36,754,891,000</b>	<b>36,010,148,938</b>	<b>97.97</b>	<b>744,742,062</b>	<b>31.330.254.000</b>	<b>31.061.113.713</b>	<b>99.14</b>	<b>269.140.287</b>

Dari perbandingan Alokasi anggaran tahun 2020 dan tahun 2019 diatas, terdapat beberapa Program yang mengalami kenaikan dan ada pula Program yang mengalami penurunan. Terdapat 4 (empat) alokasi anggaran yang mengalami kenaikan yaitu pada Program (Eselon I): a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya (Sekretariat Jenderal); b. Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian (Direktorat Jenderal Keimigrasian); c. Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual); d. Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum & HAM (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM).

Sedangkan alokasi anggaran yang mengalami penurunan pada 4 (empat) yaitu pada Program (Eselon I): a. Administrasi Hukum Umum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum); b. Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan (Direktorat Jenderal Pemasarakatan); c. Pembentukan Hukum (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan); d. Pembinaan Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional).

Sementara alokasi anggaran Program Pemajuan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tidak mengalami perubahan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah periode antara tahun 2020 dengan 2019 terdapat program yang mengalami kenaikan persentase (%) realisasi di periode yang sama yaitu: Program Pemajuan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) naik sebesar 0.32%, Program Pembinaan Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional) naik sebesar 1.67%, serta Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum & HAM (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) yang naik sebesar 0.02%. Kenaikan realisasi anggaran tersebut diantaranya dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang dapat terlaksana dan terselesaikan di



awal tahun dimana belum terdampak wabah covid-19, serta koordinasi dan sinergi yang telah berjalan dengan baik dengan instansi internal, eksternal maupun pihak-pihak terkait lainnya.

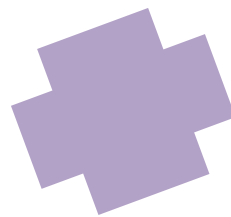
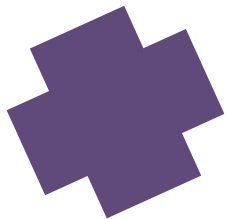
Sedangkan realisasi anggaran tahun 2020 yang mengalami penurunan yaitu realisasi anggaran: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Sekretariat Jenderal) yang turun sebesar 0.14%, Program Administrasi Hukum Umum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) turun sebesar 1.32%, Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan (Direktorat Jenderal Pemasarakatan) turun sebesar 0.08%, Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian (Direktorat Jenderal Keimigrasian) turun sebesar 34.86%, program Kekayaan Intelektual turun 4.44%, program Pembentukan Hukum (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) turun 0.21%. Penurunan realisasi anggaran tahun 2020 disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan terpaksa ditunda atau ditiadakan guna mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga perlu untuk menjadwalkan ulang kegiatan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru sesuai himbauan pemerintah, serta adanya pemotongan anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid-19 Nasional serta *Refocusing* anggaran dalam percepatan penanganan covid-19 di wilayah jawa tengah.

Efisiensi sumber daya finansial terkait capaian kinerja tahun 2020 kantor wilayah jawa tengah per program adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM (ESELON I)	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	% REALISASI ANGGARAN	% NILAI INDIKATOR	EFISIENSI
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Sekretariat Jenderal)	23,737,631,000	23,573,825,683	99.31%	108.45%	9.14%
2	Administrasi Hukum Umum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	3,139,000,000	3,087,931,430	98.37%	100%	1.63%
3	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan (Direktorat Jenderal Pemasarakatan)	1,086,765,000	1,077,746,787	99.17%	463.71%	364.54%
4	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian (Direktorat Jenderal Keimigrasian)	1,241,298,000	776,303,901	62.54%	954%	891.40%
5	Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	820,189,000	772,119,689	94.14%	254.97%	160.83%
6	Pembentukan Hukum (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	175,265,000	174,053,183	99.31%	358%	258.19%
7	Pemajuan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)	308,738,000	308,036,216	99.77%	2028%	1928.56%
8	Pembinaan Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	6,189,016,000	6,183,217,624	99.91%	247.38%	147.47%
9	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum & HAM (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)	56,989,000	56,914,425	99.87%	133%	33.46%
<b>Jumlah</b>		<b>36,754,891,000</b>	<b>36,010,148,938</b>	<b>97.97%</b>	<b>4647.62%</b>	<b>4549.65%</b>



## BAB IV PENUTUP



## A. Simpulan

Secara umum capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dapat merealisasikan target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati pada awal tahun 2020. Dari total jumlah seluruh alokasi pagu anggaran dari 9 DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan alokasi pagu anggaran pada tahun 2019. Dimana pada tahun 2020 total pagu anggaran Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp.36.754.891.000,00 sedangkan alokasi tahun 2019 adalah sebesar Rp.31.330.254.000,00 atau mengalami total kenaikan sebesar Rp.5.424.637.000,00. Sedangkan capaian realisasi anggaran dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan total pagu anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp.36.754.891.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.36.010.148.938,00 atau sebesar 97.97% dengan total sisa anggaran dari 9 DIPA adalah sebesar Rp.744.742.062,00 yang menyiratkan bahwa sampai dengan tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah telah menggunakan anggarannya dengan cukup optimal.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu kementerian yang mengalami pemotongan anggaran khususnya Kantor Wilayah Jawa Tengah juga mengalami pemotongan anggaran yang diperuntukkan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19 yaitu sebesar Rp.172.645.000,00. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah jumlah pemotongan anggaran pada 4 Satuan Kerja di Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp.51,143,762,000,00.

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah, Kantor Wilayah Jawa Tengah sejak bulan April telah melaksanakan Pembebasan dan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 yaitu sebanyak 2.907 WBP dengan rincian sebanyak 2.271 WBP.

Berdasarkan pelaksanaan capaian kinerja pada masing-masing DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang masih belum terlaksana atau tertunda disebabkan karena faktor wabah Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya wilayah Jawa Tengah semenjak April 2020, dimana sampai dengan bulan Desember 2020 kota Semarang khususnya masih dinyatakan sebagai zona merah covid-19 dan diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

## B. Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dikarenakan masih mewabahnya Covid-19 maka diharapkan kegiatan-kegiatan yang mengharuskan tatap muka secara langsung dapat dialihkan ke *virtual meeting*
2. Dengan peningkatan volume pekerjaan dan untuk tercapainya kinerja yang optimal, maka diperlukan penganggaran yang cukup pada tahun anggaran berikutnya
3. Percepatan realisasi anggaran harus terus ditingkatkan sehingga target realisasi anggaran tercapai dengan maksimal maksimal di akhir tahun 2020
4. Perlu meningkatkan kerjasama antara Instansi eksternal/terkait lainnya (Dilkumjakpol) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, agar kegiatan selanjutnya dapat lebih terprogram dan berjalan sesuai yang diharapkan
5. Akan terus diupayakan komunikasi dan koordinasi baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu mitra kerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM
6. Demi terselenggaranya pelayanan yang lebih baik dan optimal diperlukan penambahan SDM serta penambahan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan di Kantor Wilayah Jawa Tengah
7. Dengan peningkatan volume pekerjaan dan demi tercapainya kinerja yang optimal, maka diperlukan penganggaran yang mencukupi pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2020 kami buat untuk menjadi periksa dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah

A. Yuspahrudin  
NIP. 196305281985031002

# LAMPIRAN



**DO THE BEST  
AND ASSESS THE BEST**



**NO  
TO  
CORRUPTION**

*Jateng*



**e gov**



PERJANJIAN KINERJA (SEKRETARIAT JENDERAL)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda di bawah ini :

Nama : Dra. Tansora, Bc.I.P., M.Si.  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Bambang Rudianto Sarwanto  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi yang diperlukan serta akan melakukan analisis terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan performance dan hasil.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua  
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Dr. Bambang Rudianto Sarwanto  
NIK: 19601215198031001

Dra. Tansora, Bc.I.P., M.Si.  
NIP: 196000081984031001

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2020  
 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
 DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Rumusan Strategic	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyediakan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nilai Referensi Bimotral Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nilai Akreditasi Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	7,5 85 85

NO	Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Administrasi dan Fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp.18.902.600.000,-

Jakarta, November 2018

Pihak Kedua,  
 Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,  
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Dr. Bambang Hartono Sarwanto  
 NIP. 196012181989021031

Drs. Tarsane, S.O.P., M.S.  
 NIP. 196009051984021001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama: **Dr. Tarsono, S.S.P., M.Si.**

Jabatan: **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah**

berjanjian mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai terdapat pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah-reperth yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kesetiaan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, **November 2019**

**Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah**

**Dr. Tarsono, S.S.P., M.Si.**  
NIP. 196206061984031001





PERJAKSIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

Demi terwujudnya manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda dengan di bawah ini:

Nama : Nings Jimas, S.Kom., S.H.

Jabatan : Kepala Divisi Administrasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Tarsito, Bc.P., M.Si.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku alasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua berjanji akan melaksanakan target kinerja yang seluas-luasnya sesuai dengan perjanjian ini, akan tetapi apabila terdapat target kinerja yang kurang tercapai yang akan ditanyakan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemertaan pencapaian dan kinerja.

Demikian, 28 Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Pihak Pertama  
Kepala Divisi Administrasi

Drs. Tarsito, Bc.P., M.Si.  
NIP. 196006011964251001

Nings Jimas, S.Kom., S.H.  
NIP. 197011171935002001

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2020  
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI  
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Rata-rata reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Rata-rata kepuasan Kerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	7,1 80 85

NO	Region	Anggaran
1	Pengelolaan Administrasi dan Fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 18.000.000,000

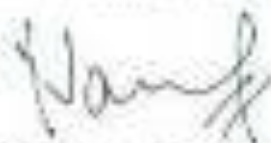
Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Pertama  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Uu. Tarwono, S.H., M.S.  
NIP. 13000600115340311 001

Pihak Kedua  
Kepala Divisi Administrasi



Novita Rizka, S.Kom., S.H.  
NIP. 19791117 198403 27333



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA DIVISI ADMINISTRASI**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK MANUSIA JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berlandaskan tujuan dibawah ini:

Nama : Nova Prasa, S.Kom., S.H.  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi

Departemen mewajibkan target kinerja yang selaras/terkait sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebijakan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tersanjung, 20 Januari 2020

Rina Pratama,  
Kepala Divisi Administrasi

Nova Prasa, S.Kom., S.H.  
NIP. 16081117 199606 2 001

PERJANJIAN KINERJA (DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Tengah	7,0
2.	Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Anak Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri	Persentase mantan narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah Jawa Tengah	35%
3.	Terwujudnya Mordan Narapidana/Anak yang Tertutur Hukum	Menurunnya persentase masalah di wilayah Jawa Tengah	1%
4.	Terwujudnya Pemanfaatan Hak Asasi	Persentase anak yang memerlukan pendidikan di wilayah Jawa Tengah	55%

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 448.243.482.300,-

Jakarta, November 2018

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Dr. Sri Puji Budi Utami, Bc.LP., M.Si.  
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Drs. Tersono, Bc.LP., M.Si.  
NIP. 196006081954031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda dibawah ini:

Nama : Drs. Tansono, Sc.I.P., M.Si.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Sri Puji Budi Utami, Sc.I.P., M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasaran

Sebagai salah satu Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama setuju akan menandatangani target kinerja yang seharusnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Pemasaran

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Dr. Sri Puji Budi Utami, Sc.I.P., M.Si.  
NIP. 196257021981002001

Drs. Tansono, Sc.I.P., M.Si.  
NIP. 196003021984031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka pencapaian pelayanan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terencana hingga dibawah ini:

Nama : Drs. Tanono, Sc.I.P., M.Si.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Sejarah akan mewujudkan target kinerja yang selaras dengan sasaran kebijakan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, November 2019

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Drs. Tanono, Sc.I.P., M.Si.  
N.P. 196206061094031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH**  
**DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Pelaksanaan Program Hukum yang Berkualitas di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan di wilayah	90%
	Terselenggaranya supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan di wilayah	Persentase LIFT Pemasyarakatan yang di susun/di dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah actual standar	90%
2.	Terwujudnya Produktifitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan berprestasi	100%
3.	Terwujudnya Mantan Narapidana/Vonis yang Taat Hukum	Meningkatnya Persentase Residivis	1%
4.	Terwujudnya Penerimaan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	30%


NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 446.245.452.000,-

Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Kedua  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan HAM Jawa Tengah

Pihak Pertama  
Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Jawa Tengah

  
Dra. Tarsimo, Sc.IP, M.Si  
NIP. 19600906-198403-1-001

  
Dra. Marsidin Siregar, Sc.IP, M.H.  
NIP. 19640425-199001-1-001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Marsidin Segar, Bc.I.P., M.H.  
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Tansono, Bc.I.P., M.Si.  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku alasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama setuju akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai rencana kegiatan ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Kedua  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Pihak Pertama  
Kepala Divisi Pemasyarakatan

  
Drs. Tansono, Bc.I.P., M.Si.  
NP. 19600605 196403 1 001



  
Drs. Marsidin Segar, Bc.I.P., M.H.  
NP. 19540425 195001 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, beranda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Marasidin Sreagar, Sc.I.P., M.H.  
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Semarang, 20 Januari 2020

Pratik Partama  
Kepala Divisi Pemasyarakatan

Drs. Marasidin Sreagar, Sc.I.P., M.H.  
NIP. 19640425 198201 1 001

## PERJANJIAN KINERJA (DIREKTORAT JENDERAL KEIMIGRASIAN)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini:

Nama: Drs. Tanono, Bc.I.P., M.Si.  
Jabatan: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: Dr. Ronny F. Somplo, S.H., M.H.  
Jabatan: Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah hingga jangka panjang yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketepatan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Imigrasi

Dr. Ronny F. Somplo, S.H., M.H.  
NIP. 196108172015081001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Drs. Tanono, Bc.I.P., M.Si.  
NIP. 19600806 196403 1 001

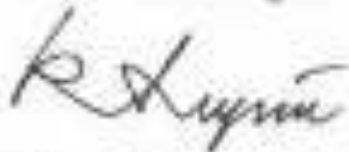
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
 DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Dasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah	7,3
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah	2%

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 58.207.202.000,-

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,  
 Direktur Jenderal Imigrasi



Dr. Ronny F. Gonyac, S.H., M.H.  
 NIP. 198109172315051001

Pihak Pertama,  
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Drs. Tarsone, Bc.I.P., M.Si.  
 NIP. 196006261954031011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berpedoman dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama : ( Drs. Tansono, S.H., M.Si )

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebelumnya sudah tercantum pada perjanjian ini, dengan sungguh-sungguh mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keterbacaan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

JAKARTA, November 2019

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Drs. Tansono, S.H., M.Si.  
NIP. 199009061984031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA DIVISI KEMIGRASIAN**  
**DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah	7,3
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penuntasan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah	2%

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp.56.201.202.000,-

Semarang, 20 Januari 2020

Direk. Kesug.  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Drs. Tarsono, M. I. W., M. S.  
NIP. 19922006 190303 1 001

Fitriah Poliana  
Kepala Divisi Keimigrasian

Fitriah Poliana, Nersandayani, S. Pd., M. Pd.  
NIP. 19600912 198103 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA DIVISI KEMEROGSIAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Esti Winahyu Nurhandayani, S.Pd., M.Pd.  
Jabatan: Kepala Divisi Kemerogsian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: Dra. Tersonek, Dc.I.P., M.Si.  
Jabatan: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai dengan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kemampuan dan keagahan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

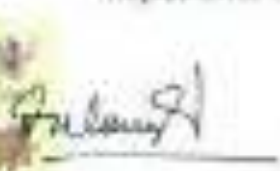
Pihak Kedua akan melakukan dukungan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Soranang, 20 Januari 2020

Pihak Kedua  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Pihak Pertama  
Kepala Divisi Kemerogsian

  
Dra. Tersonek, Dc.I.P., M.Si.  
NP. 1902009101998-1-001

  
Esti Winahyu Nurhandayani, S.Pd., M.Pd.  
NP. 190200912190103.2-001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA DIVISI KEMIGRASIAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Est. Winahyu Nuhandayani, S.Pd., M.Pd.  
Jabatan : Kepala Divisi Kemigrasian

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan seperti yang telah dibarengi dalam dokumen perencanaan.

Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Pertama  
Kepala Divisi Kemigrasian

Est. Winahyu Nuhandayani, S.Pd., M.Pd.  
NP. 19600912-1981032-001

PERJANJIAN KINERJA (DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah Jawa Tengah yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Jawa Tengah yang diselesaikan	3,0 60%


NO	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 5.803.142.000,-

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

  
Isthyo Rahardian Mulyo, S.H., LL.M.  
N.P. 196009011964021001

  
Drs. Tawono, Bc.P., M.Si.  
N.P. 196006011964021001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda di bawah ini :

Nama : Drs. Tansono, Sc.I.P., M.Si  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai terdapat perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP. 196609181094031031

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

  
Drs. Tansono, Sc.I.P., M.Si.  
NIP. 196306051964031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Tatjana, Sc.I.P., M.Si.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebahagiaan dan kegagahan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, November 2019

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Dr. Tatjana, Sc.I.P., M.Si.  
NIP. 196008061984001001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**  
**DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertepatnya penyederahan informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah Jawa Tengah yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah Peningkatan layanan program AHU di Kantor Wilayah Jawa Tengah yang diselenggarakan	30  80%

NO	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 5.603.142.000

Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Kedua  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Drs. Tarezo: B.S.P. M.Si  
NIP. 19600605-198405-1-001

Pihak Pertama  
Pe. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Nurida Emma, S.Kep.A., S.H.  
NIP. 19761117-199203-2-001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Novita Imans, S.Kom., S.H.  
Jabatan: Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: Drs. Tarsoho, Bc.L.P., M.Si.  
Jabatan: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 20 Januari 2020.

Pihak Kedua  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan  
HAM

  
Drs. Tarsoho, Bc.L.P., M.Si.  
NIP. 196008101380017001

  
Novita Imans, S.Kom., S.H.  
NIP. 197611171959082001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berikut ditandatangani dibawah ini :

Nama : Novita Intans, S.Kom, S.H.  
Jabatan : Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberthasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Serateng, 20 Januari 2020

Finak Fertana,  
Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan  
HAM

Novita Intans, S.Kom, S.H.  
NIP. 197611171989032001



PERJANJIAN KINERJA (DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tertelenggaranya pelayanan Kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian permohonan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	470 Jumlah Permohonan
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan promosi Kekayaan intelektual kepada para stakeholder di oleh Kantor Wilayah	50 Stakeholder
		Jumlah pelaksanaan kegiatan penerangan pengingat kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Loka

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelayanan pelayanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 600.155.000,-

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Dr. Freddy Haris S.H., LL.M., A.C.C.S.  
NIP. 196511181994031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Drs. Tersana, S.I.P., M.Si.  
NIP. 196206061964031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Tarsoro, Bc.I.P., M.Si.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Freddy Herya, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebelumnya sudah tercantum perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

  
Dr. Freddy Herya, S.H., LL.M., A.C.C.S.  
NIP. 196611181004031001

  
Drs. Tarsoro, Bc.I.P., M.Si.  
NIP. 196006061984031001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, beranda dengan di bawah ini :

Nama : Drs. Tansono, Bc.L.P., M.Si  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai terdapat perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keterampilan dan pengalaman pelaksanaan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, November 2019

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Drs. Tansono, Bc.L.P., M.Si  
NIP. 1950060019804031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**  
**DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian perdamaian pemohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	470 Jumlah Pemohonan
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan promosi Kekayaan Intelektual kepada para stakeholder KI di Kantor Wilayah	20 Stakeholder
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lotus

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Kekayaan intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 320.100.000,-

Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Drs. Tarsono, B.A.P., M.Si.  
N.P. 19600605.198403.1.001

Pihak Pertama,  
Pejabat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Nuzula Ernani, S.Kom., S.H.  
N.P. 19761117.199803.2.001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berhadapan dengan dibawah ini :

Nama : Novita Imans, S.Kom., S.H.  
Jabatan : Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. Tarsono, S.S.P., M.Si.  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah secara menyeluruh yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Kedua  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

  
Drs. Tarsono, S.S.P., M.Si.  
NIP. 19600606-198403-1-001

  
Novita Imans, S.Kom., S.H.  
NIP. 19761117-199603-2-001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berlandaskan dengan dibawah ini:

Nama : Novita Amalia, S.Kom., S.H.  
Jabatan : PH Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

tersebut akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 20 Januari 2020

Prak Purama  
PE Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan  
HAM

Novita Amalia, S.Kom., S.H.  
NIP. 19751117 198203 2 001

PERJANJIAN KINERJA (DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
 DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tertawabiasanya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang berfektifitas	20 Raperda
2.	Terselenggaranya pembinaan pemencang peraturan perundang-undangan	Jumlah tenaga pemencang peraturan perundang-undangan di wilayah yang mendapatkan pembinaan	22 Orang

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Fasilitas Pemencangan Hukum di Wilayah	Rp. 175.200.000,-

Atas nama, November 2018

Pihak Keriau,  
 Direktur Jenderal  
 Peraturan Perundang-undangan

Pihak Pemerasa,  
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Prof. Dr. Widodo Ekaningsih, S.H., M.Hum.  
 NIP. 196306011923001005

Drs. Tono, S.S., M.S.  
 NIP. 196006001984031001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berlandaskan dengan di bawah ini :

Nama : Dvo. Tarsono, Sc.I.P., M.Si.  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Prof. Dr. Widodo Ekuwijana, S.H., M.Hum.  
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Berikut alasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebelumnya sesuai lingkup perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Prof. Dr. Widodo Ekuwijana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197136011980031001

Dvo. Tarsono, Sc.I.P., M.Si.  
NIP. 196006061984051001



**PERJALJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama: | Drs. Tansono, Bc.I.P., M.Si.  
Jabatan: | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebertanggung-jawaban dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, November 2019

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Drs. Tansono, Bc.I.P., M.Si.  
NIP. 196002061984031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**  
**DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertatas ilakunya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang tertesitau	20 Raperda
2	Terseleenggaranya pembinaan pejabat pembuat peraturan perundang-undangan	Jumlah teruga pembuat peraturan perundang-undangan di wilayah yang mendapatkan pembinaan	22 Orang

NO	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	Rp.175.265.000,-

Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Kedua  
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Drs. Tardus, Bc-IP, M.Si.  
 NIP. 19600605 198403 1 001

Pihak Pertama  
 PE. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Nurta Imas, S.Kom.  
 NIP. 19761117 199603 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Imara, S.Kom., S.H.  
Jabatan : Pt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. Tarsono, Bc.P., M.Si.  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Sebagai alasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan meminta tindakan yang diperlukan dalam rangka pembenahan penganggaran dan sanksi.


Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Pihak Pertama,  
Pt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan  
HAM

  
Drs. Tarsono, Bc.P., M.Si.  
NIP. 19600806 198403 1 001



  
Novita Imara, S.Kom., S.H.  
NIP. 19761117 199603 2 021



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda target dibawah ini

Nama : Nova Imani, S.Kom, S.H.  
Jabatan : Pb. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Pertama  
Pb. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan  
HAM

Nova Imani, S.Kom, S.H.  
NP. 13751117-100003 2 001

PERJANJIAN KINERJA (DIREKTORAT JENDERAL HAM)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan yang berorientasi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	15 Instansi Pemerintah
		Jumlah Kabupaten/Kota Realisasi HAM	5 Kabupaten/Kota
		Jumlah instansi pemerintah yang memiliki jalur hasil Diseminasi dan Pengujian HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi pemenuhan dan pemertahanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	2 Rekomendasi

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemertaan HAM di Wilayah	Rp. 358.738.000,-

Jakarta, November 2019

Rahm Kotibe,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Pilih Partana,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Dr. Muhsinin Abdi, S.H., M.H.  
NIP. 19621121-1982031001



Drs. Tarsono, BCLP., MSL  
NIP. 19630906-1984031001



PERJANJIAN KERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda dengan dibawah ini :

Nama : Dr. Tansono, Bc.L.P., M.Si  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Muslimin Abd., S.H., M.H.  
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pertanggung jawaban yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Dr. Muslimin Abd., S.H., M.H.  
NIP. 196211211982051001



Dr. Tansono, Bc.L.P., M.Si  
NIP. 196306031964031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Yansono, Dr. I.P., M.Si.  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebelumnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Koherhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta,      November 2019

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Dra. Yansono, Dr. I.P., M.Si.  
NIP. 195006091984031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**  
**DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**JAWA TENGAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan pembinaan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program des. HAM	15 Instansi Pemerintah
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	5 Kab/Kota
		Jumlah instansi pemerintah yang melakukan lanjut hasil Diemmas dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi

NO	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp.308.738.000,-


Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Kedua  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Dra. Tamara, Rg. I.P., M.Si  
NIP. 19600605 195405 1 001

Pihak Pertama  
PB Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



Novita Frans, S.Kom., S.H.  
NIP. 19761117 199603 2 001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Diom rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda lanjut dibawah ini:

Nama : Novia Imanis S.Kom., S.H.  
Jabatan : Pt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Tarsono, Bc.I.P., M.Hi  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Pihak Pertama,  
Pt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan  
HAM

Drs. Tarsono, Bc.I.P., M.Hi  
NIP. 19500006 198403 1 001

Novia Imanis S.Kom., S.H.  
NIP. 19761117 198003 2 031



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda-tangan dibawah ini:

Nama: Novita Intans, S.Kom, S.H.  
Jabatan: Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bertanda-tangan, 20 Januari 2020

Pihak Pertama,  
Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Novita Intans, S.Kom, S.H.  
NIP. 15764117 180903-2-001

PERJANJIAN KINERJA (BPHN)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH  
DENGAN KEPALA BADAN PEMERINTAHAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang/keompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Legal	557 Orang
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/keompok masyarakat miskin	75 Kegiatan
		Terdelenggaranya penyelenggaraan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah
		Jumlah penyediaan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah
		Terdelenggaranya kegiatan pembinaan pembantuan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah
		Terdelenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDI-PM	1 Kantor Wilayah

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 5.882.046.000,-

Jakarta, November 2019

Fitrah Kodjo,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.M.  
NIP. 135204101987031003

Fitrah Partama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Drs. Tarsono, B.S.P., M.S.  
NIP. 196006061984031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Tansono, Bc.LP., M.Si  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lamiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NP. 196204101897031003

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Drs. Tansono, Bc.LP., M.Si  
NP. 196026061984031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berdasarkan dengan di bawah ini :

Nama : Drs. Tarsono, Bc.L.P., M.Si  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, November 2019

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Drs. Tarsono, Bc.L.P., M.Si  
NIP. 196003001984031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**  
**DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**JAWA TENGAH**

No.	Gesaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat/makut yang memperoleh Bantuan Hukum gratis	507 Orang
		Jumlah kegiatan bantuan non legal kepada orang/kelompok masyarakat miskin	72 Orang
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentuktan prosedur hukum daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya layanan normatantu hukum melalui sistem JAHN	1 Kantor Wilayah

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 5.952.045.000,-

Semarang, 20 Januari 2020

Partai Kedua  
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Drs. Triandis, B.C.P., M.S.  
 NIP. 19620808 198403 1 001

Partai Pertama  
 Ft. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Nova Liana, S.Kon., S.H.  
 NIP. 19761117 199903 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Novita Imara, S.Kom., S.H.  
Jabatan: Pt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama: Drs. Tarsono, Sc.I.P., M.Si  
Jabatan: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Sebagai atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai terdapat perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Pihak Pertama,  
Pt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan  
HAM

Drs. Tarsono, Sc.I.P., M.Si  
NIP. 19600606 198400 1 001

Novita Imara, S.Kom., S.H.  
NIP. 19761117 199903 2 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, beranda targetan dibawah ini

Nama : Nosta Emma, S.Kom, S.H.  
Jabatan : Pt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

terjadi akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Kebemhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Pertama  
Pt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan  
HAM

Nosta Emma, S.Kom, S.H.  
NIP. 10701117 1990032 001

PERJANJIAN KINERJA (BALITBANGHAM)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH  
 DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM

No	Rumusan Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tertanggungnya perwujudan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset	Penerapan rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan pertimbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diselesaikan di wilayah	1 Buku

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Fasilitas dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 56.000.000,-

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,  
 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
 Hukum dan HAM

Pihak Pertama,  
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Dr. Agus Karna, S.H., M.M.  
 N.P. 199211181660031001



Drs. Tarsandi, S.S.P., M.Si.  
 N.P. 196006061960031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Tansoni, S.I.P., M.Si.  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Asop Kusna, S.H., M.M.  
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Selaku jabatan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Hukum dan HAM

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

  
Dr. Asop Kusna, S.H., M.M.  
NIP. 196311101980031001

  
Drs. Tansoni, S.I.P., M.Si.  
NIP. 196003051984001021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berlandaskan dengan dibawah ini :

Nama : Dra. Tarsono, Bc.I.P., M.Si.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, November 2019

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Dra. Tarsono, Bc.I.P., M.Si.  
NIP. 195003061984031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**  
**DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertetapkannya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.	Penelitian/rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penulisan/pengajuan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
		Hasil penulisan/pengajuan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diadopsikan di wilayah.	1 Buku

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 58.933.000,-

Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Kedua  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Drs. Tarsoyo, S.P., S.H.  
NIP. 19600806 198403 1 001

Pihak Pertama  
Ft. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Novita Simanungkalit, S.K.H.  
NIP. 19761117 199909 2 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Novita Intana, S.Kom., S.H.  
Jabatan: Pt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sebagainya disebut Pihak Pertama

Nama: Drs. Tansud, S.H.P., M.Si  
Jabatan: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Sebagai atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 20 Januari 2020

Pihak Kedua  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Pihak Pertama  
Pt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan  
HAM

  
Drs. Tansud, S.H.P., M.Si  
NIP. 19500606 198403 1 011

  
Novita Intana, S.Kom., S.H.  
NIP. 19761117 199903 2 021



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Idrans, S.Kom., S.H.  
Jabatan : Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

terang akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah dibicarakan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 20 Januari 2020

Ptuk Pertama  
Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan  
HAM

Novita Idrans, S.Kom., S.H.  
NIP. 19781117 199803 2 001















Kode	Uraian (Sifat dan Jumlah, 11 Tahun, 12/2016, rekening anggaran)	Revisi	Perkiraan	Sisa Dana
021211	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	000 000	00	000 000
021212	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	1 000 000	00	1 000 000
<b>0204 010 107</b>	<b>000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00</b>	<b>20 000 000</b>	<b>00</b>	<b>20 000 000</b>
020	<b>000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>00</b>	<b>1 000 000</b>
A	<b>000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>00</b>	<b>1 000 000</b>
021211	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	1 000 000	00	1 000 000
020	<b>000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00</b>	<b>20 000 000</b>	<b>00</b>	<b>20 000 000</b>
A	<b>000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00</b>	<b>20 000 000</b>	<b>00</b>	<b>20 000 000</b>
021211	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021212	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	20 000 000	00	20 000 000
021213	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021214	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021215	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021216	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021217	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021218	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
<b>0204 010 108</b>	<b>000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00</b>	<b>20 000 000</b>	<b>00</b>	<b>20 000 000</b>
020	<b>000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00</b>	<b>20 000 000</b>	<b>00</b>	<b>20 000 000</b>
A	<b>000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00</b>	<b>20 000 000</b>	<b>00</b>	<b>20 000 000</b>
021211	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021212	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021213	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021214	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021215	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021216	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021217	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021218	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021219	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021220	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021221	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021222	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021223	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021224	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021225	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021226	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021227	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021228	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021229	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021230	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021231	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021232	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021233	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021234	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021235	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021236	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021237	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021238	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021239	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021240	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021241	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021242	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021243	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021244	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021245	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021246	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021247	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021248	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021249	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000
021250	000000 000 000 00 00 00 (Revisi) 00 00 00	0 000 000	00	0 000 000























REALISASI DIPAL BALITBANGHAM

Bulan : Desember

kode	Uraian (bagian - subbagian - akun - subakun - subakun)	Angka	Saldo	Saldo Awal
04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	98.999.000	98.914.429	98.917
044	Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Industri dan KAM di Wilayah	98.999.000	98.914.429	98.917
044.001	Jasa dan Biaya	98.999.000	98.914.429	98.917
044.001.001	Jasa dan Biaya	98.999.000	98.914.429	98.917
052	Penghasilan bukan dari hak asal menurut di wilayah	30.000.000	30.000.000	0
A	Saluran Mula dan 15% Jasa Mula (15%)	30.000.000	30.000.000	0
021111	00000000-A-0-0-000-00-000 Saluran Mula	4.000.000	4.000.000	4.000
021112	00000000-A-0-0-000-00-000 Saluran Jasa Mula	0.000.000	0.000.000	0
021113	00000000-A-0-0-000-00-000 Saluran Jasa Mula	11.000.000	11.000.000	0
021114	00000000-A-0-0-000-00-000 Saluran Jasa Mula	1.000.000	1.000.000	0
B	Penghasilan dan Penghasilan (15%)	17.000.000	17.000.000	1.000
021115	00000000-A-0-0-000-00-000 Saluran Jasa Mula	11.000.000	11.000.000	1.000
063	Pengembangan hasil penelitian bukan dari hak asal menurut di wilayah	30.000.000	30.000.000	0
A	Saluran Mula dan 15% Jasa Mula (15%)	30.000.000	30.000.000	0
021114	00000000-A-0-0-000-00-000 Saluran Mula	13.000.000	13.000.000	0
021115	00000000-A-0-0-000-00-000 Saluran Jasa Mula	1.000.000	1.000.000	0
021116	00000000-A-0-0-000-00-000 Saluran Jasa Mula	1.000.000	1.000.000	0

0 - Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti (tidak ada bukti atau tidak ada bukti) dan pengembalian (dikembalikan)